



Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah Kabupaten Bangkalan 2018



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SARAN	2
1.3. RUANG LINGKUP	3
BAB II KONSEP DAN DEFINISI	4
2.1. KONSEP KESEJAHTERAAN	4
2.2. KEPENDUDUKAN	6
2.3. KESEHATAN.....	7
2.4. PENDIDIKAN.....	8
2.5. KETENAGAKERJAAN.....	9
2.6. PERUMAHAN	11
2.7. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	12
2.8. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER.....	14
2.9. PERTANIAN.....	15
2.10.PARIWISATA	16
BAB III METODE PENULISAN.....	17
3.1. LOKASI PENELITIAN.....	17
3.2. METODE ANALISIS	17
BAB IV DATA STATISTIK DAN ANALISA DAERAH.....	19
4.1. KONDISI GEOGRAFIS.....	19
4.2. KONDISI EKONOMI KABUPATEN BANGKALAN	20
4.3. KONDISI SOSIAL KABUPATEN BANGKALAN	23
4.4. JUMLAH PENDUDUK	24
4.5. SEX RATIO	27
4.6. PERSEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK.....	29
4.7. UMUR PERKAWINAN PERTAMA.....	31
4.8. PENGGUNAAN ALAT/CARA KONTRASEPSI	32

4.9. DERAJAT DAN STATUS KESEHATAN PENDUDUK.....	33
4.10. PENOLONG PERSALINAN	34
4.11. FASILITAS KESEHATAN	36
4.12. JENIS/CARA PENGOBATAN	36
4.13. ANGKA MELEK HURUF.....	37
4.14. TINGKAT PENDIDIKAN	38
4.15. TINGKAT PARTISIPASI SEKOLAH.....	39
4.16. FASILITAS PENDIDIKAN	40
4.17. ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN	41
4.18. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)	42
4.19. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)	42
4.20. LAPANGAN USAHA.....	43
4.21. STATUS PEKERJAAN.....	45
4.22. KUALITAS RUMAH TANGGA	45
4.23. FASILITAS RUMAH TANGGA	47
4.24. PERKEMBANGAN PENDUDUK MISKIN.....	48
4.25. PENGELUARAN RUMAH TANGGA.....	53
4.26. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM).....	55
4.27. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)	56
4.28. PENDAPATAN DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB).....	57
4.29. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB	59
4.30. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	60
4.31. INDEKS IMPLISIT PDRB	60
4.32. LAJU IMPLISIT PDRB (INFLASI).....	61
4.33. INDEKS GINI.....	61
4.34. INDEKS DISPARITAS	63
4.35. KINERJA PERDAGANGAN	64
4.36. KINERJA INVESTASI.....	65
4.37. NILAI TUKAR PETANI (NTP).....	67
4.38. KOPERASI	70
4.39. PERTANIAN	75

4.40. PETERNAKAN81
4.41. PERIKANAN.....	.83
4.42. PARIWISATA85

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.	BAGAN ALUR PENYUSUNAN BANGKALAN DALAM ANGKA 2018	17
GAMBAR 2.	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2010-2017	26
GAMBAR 3.	PEMETAAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2017	27
GAMBAR 4.	SEX RATIO KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011-2017	28
GAMBAR 5.	PEMETAAN SEX RATIO KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011-2017	29
GAMBAR 6.	PERSEBARAN KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN BANGKALAN	30
GAMBAR 7.	PERSENTASE USIA PERKAWINAN PERTAMA KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2014-2017	32
GAMBAR 8.	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT/CARA KB DI KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2017	33
GAMBAR 9.	ANGKA HARAPAN HIDUP KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013-2017	34
GAMBAR 10.	PERSENTASE PERTOLONGAN PERSALINAN KABUPATEN BANGKALAN 2013-2017	35
GAMBAR 11.	PERSENTASE PENDUDUK 15 TAUN KEATAS MENURUT KEMAMPUAN MEMBACA AN MENULIS TAHUN 2016-2017	37
GAMBAR 12.	PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK MENURUT SEKOLAH YANG DI TAMATKAN DI KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2016-2017	39
GAMBAR 13.	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2015-2017	40
GAMBAR 14.	RASIO MURID-GURU KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2017	41
GAMBAR 15.	PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT SEKTOR KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2016-2017	44
GAMBAR 16.	PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN TAHUN 2017	45
GAMBAR 17.	KUALITAS RUMAH TANGGA BERDASARKAN LANTAI DI KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2014-2017	46

GAMBAR 18. PETA CAPAIAN LISTRIK DI KABUPATEN BANGKALAN	47
GAMBAR 19. GARIS KEMISKINAN KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013-2017.....	49
GAMBAR 20. INDEKS GINI KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2008-2015.....	50
GAMBAR 21. PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK MISKIN KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013-2017.....	51
GAMBAR 22. INDEKS KEDALAMAN DAN KEPARAHAN TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013-2017.....	52
GAMBAR 23. PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA UNTUK MAKANAN DAN BUKAN MAKANAN TAHUN 2017.....	54
GAMBAR 24. PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA UNTUK MAKANAN DAN BUKAN MAKANAN TAHUN 2017.....	54
GAMBAR 25. PERKEMBANGAN NILAI LAMA PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2016-2017.....	55
GAMBAR 26. PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013-2017.....	56
GAMBAR 27. CAPAIAN IPG KABUPATEN BANGKALAN	57
GAMBAR 28. PERKEMBANGAN PDRB KABUPATEN BANGKALAN	57
GAMBAR 29. PERKEMBANGAN JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA DI KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2015-2017.....	86

BAB I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Tujuan utama pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat sejahtera yang merupakan tujuan utama dari Pemerintah Republik Indonesia, dimana masyarakat hidup dalam keadaan aman, sentosa dan makmur serta berkecukupan, baik dalam dimensi fisik maupun non fisik. Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebagai representasi dari Pemerintah Republik Indonesia, dalam mensejahterakan masyarakatnya diharapkan bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industry dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, sekaligus memfasilitasi elemen masyarakat lokal dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan guna menciptakan pemerataan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan merupakan dua skema untuk membangun kemakmuran, disisi lain Pemerintah Daerah dapat melakukan reformasi pelayanan publik dan kebijakan pembangunan sosial untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pelayanan publik yang paling mendasar adalah pendidikan dan kesehatan, sementara dalam mengurangi kemiskinan merupakan aksi mendasar dalam kebijakan sosial. Dalam Konteks Pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bangkalan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam visi “TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS”, selanjutnya dari visi tersebut dijabarkan melalui misi pertama yaitu Mewujudkan sumber daya manusia Bangkalan yang agamis, produktif, berkualitas dan berdaya saing dan Mempercepat peningkatan perekonomian berbasis potensi lokal.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah melakukan/melaksanakan program-program yang telah dituangkan dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, meskipun dalam pelaksanaannya tidak semua program tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Untuk memperoleh

gambaran menyeluruh terhadap perkembangan kesejahteraan masyarakat yang telah dicapai selama ini, diperlukan indikator-indikator kesejahteraan yang akan memberikan informasi mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek yang meliputi kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan perumahan, dimana informasi tersebut selain sebagai bahan evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini, juga sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan pembangunan di Kabupaten Bangkalan pada tahun-tahun mendatang.

Selanjutnya dalam penyusunan dan pengumpulan data data statistik daerah Kabupaten Bangkalan 2018 Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Dalam Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah atau disebut juga dengan Kabupaten Bangkalan Dalam Angka kali ini disertai juga dengan analisisnya secara makro maupun mikro.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud.

Maksud dari penyusunan Dokumen Bangkalan Dalam Angka adalah untuk menyajikan informasi mengenai potret dan perkembangan ekonomi, sosial, pendidikan, dan Budaya masyarakat di Kabupaten Bangkalan dalam jangka waktu tiga tahun terakhir.

2. TUJUAN.

Tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah untuk mengetahui sejauhmana hasil dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD), sebagai implementasi dari visi dan misi Bupati Kepala Daerah yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam RPJMD, serta sebagai acuan bagi Pemerintah dalam mengambil langkah-langkah yang lebih konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. SASARAN.

Sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan Dokumen Bangkalan Dalam Angka ini adalah selain masyarakat, juga Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksana kegiatan/program yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

1.3 Ruang Lingkup

Dimensi kesejahteraan rakyat di sadari sangat luas dan kompleks sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya terlihat (*visible*) jika dilihat dari suatu aspek tertentu. Oleh karena itu dalam publikasi ini kesejahteraan rakyat diamati dari berbagai aspek yang spesifik yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan perumahan. Setiap aspek di sajikan secara terpisah dan merupakan bab tersendiri. Selain itu, tidak semua permasalahan kesejahteraan rakyat dapat diamati dan atau dapat diukur. Publikasi ini hanya menyajikan permasalahan kesejahteraan rakyat yang dapat diamati dan dapat diukur (*measurable welfare*) baik dengan menggunakan indikator tunggal maupun indikator komposit.

BAB II. Konsep dan Definisi

2.1. Konsep Kesejahteraan

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih adawarga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:

1. Rasa Aman
2. Kesejahteraan
3. Kebebasan
4. Jati diri

Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:

1. Tingkat pendapatan keluarga;
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan;
3. Tingkat pendidikan keluarga;
4. Tingkat kesehatan keluarga, dan;
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Menurut Kollé (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan antara lain:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepenuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.”

Definisi-definisi di atas mengandung pengertian bahwa kesejahteraan sosial mencakup berbagai usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, baik itu di bidang fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi dan spiritual.

Wismuadji (2008: 2) mengemukakan bahwa tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk pada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan dan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan secara agregat.

Robi dalam Narwoko (2006: 114) mengemukakan bahwa tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari

tua, keterbatasan dari kemiskinan, dan sebagainya. Dengan kata lain lingkup substansi kesejahteraan seringkali dihubungkan dengan lingkup kebijakan sosial. Indikator Tingkat Kesejahteraan. Nugroho (2004: 17) mengemukakan bahwa indikator kesejahteraan berkaitan erat dengan kemiskinan karena seseorang digolongkan miskin atau tidak jika seberapa jauh indikator-indikator kesejahteraan tersebut telah di penuhi. Indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui dimensi moneter yaitu pendapatan dan pengeluaran. Disamping itu, kesejahteraan dapat dilihat melalui dimensi nonmoneter misalnya kesejahteraan, pendidikan dan partisipasi sosial.

2.2. Kependudukan

Menurut Malthus menekankan tentang pentingnya keseimbangan pertambahan jumlah penduduk menurut deret ukur terhadap persediaan bahan makanan menurut deret hitung. Teori Malthus tersebut sebetulnya sudah mempersoalkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Sedangkan menurut Marxist tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja (misalnya di negara kapitalis) Marxist juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk yang dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk. Dari aspek kependudukan hal yang dilihat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat adalah beberapa aspek seperti berikut :

- a. **Penduduk** adalah setiap orang yang menetap di suatu wilayah selama enam bulan atau lebih dan atau yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap lebih dari enam bulan.
- b. **Tingkat Kepadatan** adalah jumlah penduduk di suatu wilayah di bagi dengan luas wilayah yang bersangkutan.
- c. **Rasio Jenis Kelamin** (*Sex Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

2.3. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu modal manusia (human capital) yang sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Kesehatan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui beberapa cara, seperti perbaikan kesehatan seseorang akan menyebabkan pertambahan dalam partisipasi tenaga kerja, perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan yang kemudian menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi, ataupun perbaikan kesehatan menyebabkan bertambahnya penduduk yang akan membawa tingkat partisipasi angkatan kerja. Secara teoritis, WHO menyebutkan bahwa hubungan antara kesehatan dan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut.

Pada tingkat mikro yaitu pada tingkat individual dan keluarga, kesehatan adalah dasar bagi produktivitas kerja dan kapasitas untuk belajar di sekolah. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih enerjik dan kuat, lebih produktif, dan mendapatkan penghasilan yang tinggi. Keadaan ini terutama terjadi di negara-negara sedang berkembang, dimana proporsi terbesar dari angkatan kerja masih bekerja secara manual. Pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik merupakan masukan (input) penting untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Beberapa pengalaman sejarah besar membuktikan berhasilnya tinggal landas ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang cepat didukung oleh terobosan penting di bidang kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit dan peningkatan gizi. Aspek-aspek kesehatan untuk mewujudkan kesejahteraan ialah :

- a. **Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Sarana Kesehatan** adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah sarana kesehatan yang tersedia.
- b. **Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Tenaga Kesehatan** adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia.

- c. **Persentase Persalinan Oleh Tenaga Medis** adalah rasio banyaknya proses persalinan yang di tolong oleh tenaga medis (dokter, paramedis, bidan, dan perawat) terhadap seluruh persalinan yang terjadi pada saat tertentu.
- d. **Persentase Pendudukan Yang Mengalami Keluhan Kesehatan** atau **Angka Kesakitan** adalah rasio antara banyaknya penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dibagi dengan jumlah pendudukan pada suatu saat.
- e. **Rata-Rata Lama Sakit** adalah rata-rata yang lamanya terganggu kesehatan (dalam hari) yaitu terganggunya kegiatan/aktivitas sehari-hari bagi seseorang yang mengalami keluhan kesehatan.

2.4. Pendidikan

Pendidikan secara universal berarti upaya perubahan manusia menjadi lebih cerdas, yang dalam konsep filsafat pendidikan Indonesia dinyatakan bahwa pendidikan ialah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun kecerdasan di sini jangan ditafsirkan sebagai kecerdasan kognitif atau intelektual belaka, tapi kecerdasan manusia yang seutuhnya, kecerdasan total manusia dalam berbagai bidang kehidupannya. Modal fisik, tenaga kerja dan kemajuan teknologi adalah tiga faktor pokok masukan (input) dalam produksi pendapatan nasional. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka kualitas manusia meningkat untuk dapat mengolah sumber daya alam yang ada untuk produksi. Menurut Elwin Tobing saat ini paling tidak tiga perspektif secara teoritis yang menjelaskan hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi, yakni teori modal manusia, teori alokasi dan teori reproduksi strata sosial. Aspek kualitas pendidikan sebuah wilayah dapat dilihat dari :

- a. **Bersekolah** adalah terdaftar dari aktif mengikuti proses belajar mengajar disuatu jenjang pendidikan ormal, baik yang dibawah pengawasan kementerian diknas maupun kementerian/instansi lain.

- b. **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** adalah perbandingan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu yang masih sekolah dengan jumlah penduduk pada kelompok usia yang bersesuaian.
- c. **Angka Melek Huruf (AMH)** adalah perbandingan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun keatas.
- d. **Rasio Murid dan Guru** adalah perbandingan antara jumlah murid dan guru pada jenjang pendidikan yang bersesuaian.
- e. **Rasio Murid dan Sekolah** adalah perbandingan antara jumlah murid dan sekolah pada jenjang pendidikan yang bersesuaian.

2.5. Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang sangat mendukung pembangunan, tetapi hal ini harus diiringi dengan kualitas sumber daya manusia. Pertambahan jumlah penduduk dapat dikatakan sebagai faktor pendorong dalam pembangunan ekonomi apabila hal ini diikuti oleh perluasan kesempatan kerja, akan tetapi disisi lain pertambahan penduduk dapat dikatakan sebagai penghambat apabila tidak disertai oleh adanya perluasan kesempatan kerja. secara teoritis pertumbuhan tenaga kerja dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Agar pertumbuhan ekonomi terus berlangsung, diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja dari sebelum, sesudah ataupun selama bekerja. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian dalam ketenagakerjaan adalah :

- a. **Angka Beban Tanggungan (*Depedency Ratio*)** adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang termasuk dalam usia tidak produktif (0-14 tahun/penduduk usia muda dan 65 tahun keatas/penduduk usia tua) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun).
- b. **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut harus di lakukan berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa atau keuntungan, baik berupa uang atau barang termasuk bagi pengusaha.
- c. **Menganggur** adalah keadaan seseorang yang di mana selama seminggu yang lalu (dari masa pencacahan tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang berusaha mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha atau sudah diterima tetapi belum mulai bekerja atau putus asa dalam mencari pekerjaan).
- d. **Angkatan Kerja (AK)** adalah mereka yang selama seminggu yang lalu (dari masa pencacahan) mempunyai pekerjaan baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja (karena sakit, cuti, dan sebagainya) serta mereka yang sedang menganggur.
- e. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja atau penduduk usia kerja (umur 15 tahun ke atas).
- f. **Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)** adalah perbandingan antara penduduk usia kerja yang mempunyai pekerjaan (sedang bekerja atau sementara tidak bekerja) terhadap total penduduk usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja.
- g. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** adalah perbandingan antara penduduk usia kerja yang menganggur (tidak mempunyai pekerjaan dan

sedang berusaha mencari kerja atau sedang mempersiapkan usaha atau sudah diterima tapi belum mulai bekerja).

- h. **Lapangan Usaha/Pekerjaan** ialah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja, atau yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja.
- i. **Status Pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan meliputi Berusaha sendiri, Berusaha dibantu buruh tetap/buruh tidak dibayar, Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar, buruh/karyawan/pegawai,pekerja bebas dan Pekerja keluarga/tak dibayar.

2.6. Perumahan

Menurut UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan dan permukiman menyebutkan bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia disamping pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Selain berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan alam/cuaca dan makhluk lainnya, rumah juga memiliki peran sosial budaya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan nilai kehidupan, penyiapan generasi muda, dan sebagai manifestasi jati diri. Dalam kerangka hubungan ekologis antara manusia dan lingkungannya maka terlihat jelas bahwa kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh kualitas perumahan dan permukimannya. Bagian penting dari perumahan adalah sebagai berikut :

- a. **Luas Lantai** adalah luas lantai yang di tempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Bagian-bagian yang di gunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak di masukkan dalam perhitungan luas lantai, seperti : lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (hamparan semen) dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung)
- b. **Atap Layak** adalah atap selain daun-daunan yaitu beton, genteng, sirap, seng dan asbes.

- c. **Dinding Permanen** adalah dinding yang terbuat dari susunan dari bata merah atau batako (dinding beton) dan dinding kayu.
- d. **Air Bersih** adalah sumber air minum yang berasal dari air ledeng, air kemasan dan air isi ulang atau yang berasal dari pompa/sumur/mata air terlindung dengan jarak ke tempat pembuangan limbah lebih dari 10 m.
- e. **Jamban Sehat** adalah jamban/ kakus yang digunakan oleh rumah tangga responden sendiri dengan kloset leher angsa serta dilengkapi tangki pembuangan (tangki septik).

2.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia (Biro Pusat Statistik dan UNDP, 1997). HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Index tersebut pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel india Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics, sejak itu dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan HDI tahunannya. Digambarkan sebagai "pengukuran vulgar" oleh Amartya Sen karena batasannya. indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan, dan indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

UNDP mengukur HDI dengan pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu (Arsyad Lincoln, 1999):

- a. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran.
- b. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga).
- c. Standard kehidupan yang layak diukur dengan GDP per kapita gross domestic product / produk domestik bruto dalam paritas kekuatan beli purchasing power parity dalam Dollar AS.

Menurut BKKBN, Indek Pembangunan Manusia (IPM) adalah merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia yang sudah dilakukan di suatu Negara (wilayah) (Soepono, 1999). IPM atau Human Development Indek (HDI) yang dikeluarkan oleh United Nations Development Program (UNDP) ini digunakan untuk mengukur Keberhasilan Kinerja dalam hal pembangunan manusia.

Tolok ukur yang dapat dianggap sangat pokok untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan adalah semua yang terkait dengan kesejahteraan rakyat. Kata Kesejahteraan sendiri menurut terminology dalam kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti ketentraman, kesenangan hidup, kemakmuran dan keamanan. Dan jika ingin kondisi ini dapat tercapai maka prasyarat utama yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan mutu kehidupan individu/ perorangan melalui pembangunan manusia seutuhnya.

Kualitas pembangunan manusia yang telah dicapai oleh suatu wilayah dapat dilakukan dengan mengukur mutu pembangunan tersebut dengan menggunakan parameter dengan 3 (tiga) komponen antara lain; (1) Keberhasilan dalam kesehatannya yaitu dilihat dari kemampuan hidup secara fisik yaitu dengan melihat angka harapan hidup; (2) Kemampuan untuk merefleksikan keberhasilan pengembangan pendidikan dengan melihat angka melek huruf dan lama sekolah; (3) Besarnya barang dan jasa yang dapat disediakan oleh masyarakat bagi warganya yaitu dengan melihat paritas daya beli masyarakat. Dengan kata lain

Indek pembangunan manusia diukur dengan tiga dimensi, yaitu 1) indek kesehatan, 2) pendidikan dan 3) ekonomi. Indek kesehatan diukur dari angka harapan hidup, biasanya angka harapan hidup bayi yang lahir. Indek pendidikan salah satunya dapat diukur dari angka melek huruf. Kemudian dimensi ekonomi diukur dari indek daya beli masyarakat.

Setelah IPM diketahui, maka perlu ditentukan kriteria analisisnya, dimana ketentuan tersebut adalah (Suparman, 1986) :

- Status Rendah : $IPM < 50$
- Status Menengah Bawah : $50 < IPM < 66$
- Status Menengah Atas : $66 < IPM < 80$
- Status Tinggi : $IPM > 80$

UNDP (*United Nation Development Programme*) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimated end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995).

2.8. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pengukuran pembangunan gender di Indonesia dimulai sejak *United Nations Development Program* (UNDP) mengeluarkan laporan berkala yaitu *Human Development Report* (HDR) di tahun 1990 yang mencantumkan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran kemajuan suatu negara (BPS, 2015b). Lima tahun kemudian, UNDP menambah konsep HDI dengan kesetaraan gender (*Gender Equality*). Sejak UNDP memasukkan kesetaraan gender dalam HDR, faktor kesetaraan gender selalu diikutsertakan dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan setiap negara.

Ukuran kesetaraan gender yang disusun UNDP sejak tahun 1995 adalah *Gender Development Index* (GDI) atau Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan *Gender Empowerment Measure* (GEM). Ukuran-ukuran tersebut bertitik tolak pada konsep kesetaraan. Perhitungan GDI mencakup kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal capaian kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Sedangkan GEM mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan dalam sektor sosial-ekonomi. Di Indonesia, GDI atau Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan GEM atau Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) telah dihitung Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 2009 atas kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Pada tahun 2010, UNDP melakukan perubahan metodologi pengukuran GDI disertai dengan penghitungan HDI laki-laki dan perempuan. Menyesuaikan perubahan ini, pada tahun 2015 Indonesia merilis IPG metode baru dengan *backcasting* data hingga tahun 2010. Sementara itu, metode penghitungan IDG belum berubah hingga saat ini meskipun sejak tahun 2010 UNDP telah menghilangkan GEM dalam publikasi tahunannya (HDR). Pada saat yang bersamaan, UNDP mempublikasikan Gender Inequality Index (GII) sebagai salah satu ukuran yang dianggap lebih tepat menggambarkan pemberdayaan sekaligus kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan.

2.9. Pertanian

Pertanian adalah suatu proses produksi khas yang didasarkan atas proses pertumbuhan tanaman dan hewan para petani pengatur dan menggiatkan pertumbuhan tanaman dan hewan itu. Pertanian Indonesia adalah pertanian tropika, karena sebagian besar daerahnya berada di daerah tropik yang langsung dipengaruhi oleh garis khatulistiwa yang memotong Indonesia hampir menjadi dua. Di samping pengaruh khatulistiwa, ada dua faktor alam lainnya yang ikut memberi corak pertanian Indonesia. Pertama, bentuknya sebagai kepulauan, dan kedua, topografinya yang bergunung-gunung. Dalam hubungan ini letaknya di antara dua lautan besar, yaitu lautan Indonesia dan lautan

Pasifik serta dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, juga ikut mempengaruhi iklim Indonesia, terutama perubahan arah angin dari daerah tekanan tinggi ke daerah tekanan rendah. Bentuk tanah yang bergunung-gunung memungkinkan adanya variasi suhu udara yang berbeda-beda pada suatu daerah tertentu. Pada daerah pegunungan yang makin tinggi, pengaruh iklim tropik makin berkurang dan digantikan oleh semacam iklim subtropik (setengah panas) dan iklim setengah dingin.

Pada kenyataannya, tanaman-tanaman pertanian iklim subtropik dan tanaman iklim sedang seperti teh, kopi, kina, sayur-sayuran dan buah-buahan menjadi komoditi penting dalam perdagangan domestik maupun internasional. Hal itu disebabkan iklim yang mendukung serta penduduk yang sebagian besar masih bermata pencaharian di sektor pertanian

2.10 Pariwisata

Pariwisata menurut Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan menjelaskan pariwisata sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata yang menjadi sasaran wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Sedangkan objek wisata sendiri mengandung pengertian objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna, objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan.

BAB III. Metode Penulisan

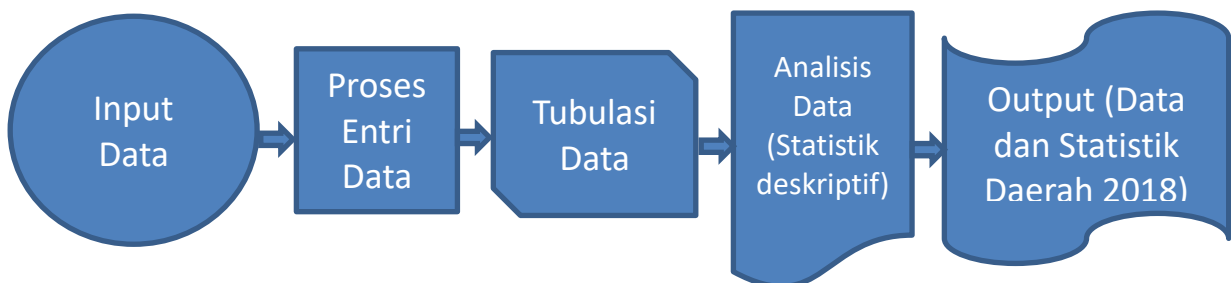
3.1. Lokasi dan Pengumpulan Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui diskusi kelompok atau Focus Group Discussion (FGD) dan pengumpulan data sekunder dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Badan Pusat Statistik (BPS).

3.2. Metode Analisis

Data yang terkumpul selanjutnya akan ditabulasikan dengan rancangan tabulasi tertentu untuk selanjutnya dilakukan analisis statistik. Data dianalisis dengan analisis statistik sederhana untuk mengetahui rata-rata, standart deviasi, distribusi, dan lain-lain.

Gambar 1. Bagan Alur Penyusunan Bangkalan Dalam Angka 2018



a) Identifikasi Bangkalan Dalam Angka

Untuk mengidentifikasi daerah, keruangan (spasial), dan unsur-unsur geografis Bangkalan dalam Angka digunakan analisis statistik deskriptif dan Sistem Informasi Geografis (SIG). SIG merupakan alat yang bermanfaat untuk mengidentifikasi ke daerah mana capaian sosial budaya dan ekonomi cenderung mengumpul atau menyebar.

Pengklasifikasian tiap-tiap kecamatan ini didasarkan atas metode distribusi yang menggunakan rata-rata (mean) dan standar deviasi (SD).

b) Sistem Informasi Geografis (SIG)

Pada dasarnya, istilah sistem informasi geografis merupakan gabungan dari tiga unsur pokok: sistem, informasi, dan geografis. SIG merupakan salah satu sistem informasi yang menekankan pada unsur informasi geografis. Istilah "Geografis" merupakan bagian dari spasial (keruangan). Kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian atau tertukar hingga timbul istilah yang ketiga, geospasial. Ketiga istilah ini mengandung pengertian yang sama di dalam konteks SIG.

Penggunaan kata geografis mengandung pengertian suatu persoalan mengenai bumi. Istilah "informasi geografis" mengandung pengertian informasi mengenai tempat-tempat yang terletak di permukaan bumi, pengetahuan mengenai posisi di mana suatu objek terletak di permukaan bumi, dan informasi mengenai keterangan-keterangan (atribut) yang terdapat di permukaan bumi yang posisinya diberikan atau diketahui. Dengan memperhatikan pengertian sistem informasi, maka SIG merupakan suatu kesatuan formal yang terdiri dari berbagai sumberdaya fisik dan logika yang berkenaan dengan obyek-obyek yang terdapat di permukaan bumi. SIG juga merupakan sejenis perangkat lunak yang dapat digunakan untuk pemasukan, penyimpanan, manipulasi, menampilkan, dan keluaran informasi geografis berikut atribut-atributnya (Prahasta, 2001:51-52).

BAB IV. Data Statistik dan Analisa Daerah

4.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Bangkalan merupakan bagian dari salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Letak Kabupaten Bangkalan berada tepat di bagian barat dari Pulau Madura. Tepatnya dari letak koordinat maka Kabupaten Bangkalan berada diantara koordinat $112^{\circ}40'06''$ - $113^{\circ}08'04''$ Bujur Timur juga $6^{\circ}51'39''$ - $7^{\circ}11'39''$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.260,41 km² . Letak geografis tersebut mendukung Kabupaten Bangkalan menjadi wilayah yang strategis, posisi wilayah Kabupaten Bangkalan yang berada paling ujung barat dari pulau Madura menjadikan Kabupaten Bangkalan sebagai pintu gerbang utama pulau Madura.

Kabupaten Bangkalan berbatasan langsung dengan beberapa wilayah ataupun tempat di Provinsi Jawa, adapun batas wilayah Kabupaten Bangkalan sebagai berikut :

- Bagian Utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa
- Bagian Timur wilayah berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sampang
- Bagian Selatan wilayah berbatasan dengan selat Madura
- Barat wilayah berbatasan dengan selat Madura

Apabila dilihat dari segi topografi wilayah, maka secara umum Kabupaten Bangkalan berada pada ketinggian 2 – 100 m diatas permukaan air laut. Namun dalam pembagian wilayah berdasarkan ketinggian diatas permukaan air laut maka wilayah di Kabupaten Bangkalan dapat dibagi menjadi dua wilayah yaitu dengan ketinggian 2 -100 m di atas permukaan air laut dan dengan ketinggian 19 – 100 m diatas permukaan air laut. Beberapa wilayah yang berada diketinggian 2 -10 m diatas permukaan air laut yaitu Kecamatan Sepulu, Bangkalan, Socah, Kamal, Modung, Kwanyar, Arosbaya, Klampis, Tanjungbumi, Labang, dan kecamatan

Burneh. Sedangkan wilayah dengan ketinggian 19 -100 m ialah Kecamatan Geger yang merupakan kecamatan tertinggi di Kabupaten Bangkalan.

Kabupaten Bangkalan memiliki topografi yang datar hingga berbukit sebagian besar wilayah digunakan untuk kegiatan pertanian. Namun pada umumnya Kabupaten Bangkalan memiliki daerah yang landai dengan persentase sebesar 54,52% dengan luas wilayah seluas 68.454 Ha, sedangkan daerah yang bergelombang seluas 11.773Ha (9,33%), daerah yang berombak sebesar 45.236 Ha (35,85%) dan daerah berbukit sebesar 719 Ha (0,57%). Secara geologis, Kabupaten Bangkalan terdiri dari 4 (empat) macam batuan yaitu alluvium, pleistosen fase sedimen, pleosen fase gamping, dan meosen fase sedimen.

Secara administratif wilayah Kabupaten Bangkalan terbagi dalam 18 kecamatan dan juga 281 desa/kelurahan dan secara spesifik terdiri dari 273 desa dan 8 kelurahan. Jumlah desa terbanyak dari setiap kecamatan bervariasi, kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Tanah Merah yaitu 23 desa/kelurahan, sedangkan kecamatan yang memiliki desa terendah dari jumlah desa di Kabupaten Bangkalan ialah Kecamatan Kamal dengan 10 desa/kelurahan.

4.2 Kondisi Ekonomi Kabupaten Bangkalan

Indikator dari keberhasilan suatu wilayah dapat dilihat dari hasil perkembangan ekonomi wilayah tersebut. Perkembangan perekonomian dapat dilihat dari besar jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut. Kabupaten Bangkalan memiliki 17 sektor perekonomian yang akan menunjang perkembangan ekonomi daerahnya. Perkembangan perekonomian Kabupaten Bangkalan dapat dilihat dari jumlah pendapatan di setiap sektornya, perkembangan PDRB di setiap sektornya dilihat setiap tahunnya untuk mengetahui peningkatan ataupun penurunan yang terjadi di Kabupaten Bangkalan.

Kabupaten Bangkalan dilihat dari tahun 2016 umumnya mengalami peningkatan namun tidak disetiap sektor mengalami peningkatan yang sama. Sedangkan perkiraan peningkatan pada tahun 2017 terjadi peningkatan di seluruh sektor ekonomi. Peningkatan signifikan ada di sektor perdagangan besar dan juga administrasi pemerintah selain itu peningkatan juga terjadi pada sector

pertambangan dan penggalian. Peningkatan PDRB Kabupaten Bangkalan meningkat di setiap sektor, sector primer sampai tersier terlihat meningkat . Berikut ini adalah gambaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangkalan di tahun 2013-2017.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 – 2017 (Miliar Rupiah)

No	Sektor Ekonomi	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4021,11	4410,61	4897,64	5262,5	5457,0
2	Pertambangan dan Penggalian	787,91	8793,03	4924,54	4313,2	4708,2
3	Industri Pengolahan	387,86	432,70	474,91	509,2	553,0
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,34	5,99	6,89	7,4	8,8
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,16	14,19	15,55	17,9	19,1
6	Konstruksi	1824,77	2133,48	2326,67	2774,5	3019,5
7	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2229,89	2451,61	2726,22	3060,0	3371,1
8	Transportasi dan Pergudangan	206,51	228,72	255,78	279,5	309,1
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	155,38	177,61	202,84	231,0	258,5
10	Informasi dan Komunikasi	691,17	740,79	806,10	893,3	977,4
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	269,10	293,43	320,10	353,9	383,9
12	Real Estate	170,22	182,51	203,08	222,2	239,1
13	Jasa Perusahaan	37,86	40,70	45,38	49,8	54,1
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	919,62	976,49	1075,37	1175,8	1262,4
15	Jasa Pendidikan	590,00	644,36	718,56	770,4	823,4
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	54,66	60,90	66,51	72,6	79,0
17	Jasa Lainnya	113,81	122,34	132,81	141,04	150,9
	Jumlah	19538,39	21708,65	19198,94	20134,4	21674,6

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018

Indikator keberhasilan pemerintah selain dilihat dari besarnya jumlah PDRB, perlu juga dilihat dari distribusi sektoralnya. kondisi perekonomian Kabupaten Bangkalan juga bisa dilihat dari kontribusi masing-masing sektor dan kelompok sektor ekonomi terhadap total PDRB. Selain itu secara tidak langsung dengan melihat kontribusi sektor-sektor ekonomi yang ada maka dapat diidentifikasi struktur ekonomi wilayah tersebut. Baik dalam struktur ekonomi

yang tergolong dengan kekuatan primer, sekunder ataupun tersier. Berikut ini gambaran kontribusi masing-masing sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Bangkalan dalam dua tahun terakhir.

Tabel 2. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 – 2017 (Persen)

No	Sektor Ekonomi	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,58	20,32	25,51	26,33	23,13
2	Pertambangan dan Penggalian	40,17	40,50	25,65	21,58	30,55
3	Industri Pengolahan	1,99	1,99	2,47	2,55	2,24
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07
6	Konstruksi	9,34	9,83	12,12	13,14	11,91
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,41	11,29	14,20	15,31	13,66
8	Transportasi dan Pergudangan	1,06	1,05	1,33	1,40	1,24
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,80	0,82	1,06	1,16	1,06
10	Informasi dan Komunikasi	3,54	3,41	4,20	4,47	3,91
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,38	1,35	1,67	1,77	1,56
12	Real Estate	0,87	0,84	1,06	1,12	0,98
13	Jasa Perusahaan	0,19	0,19	0,24	0,25	0,22
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,71	4,50	5,60	5,88	5,13
15	Jasa Pendidikan	3,02	2,97	3,74	3,85	3,38
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,28	0,28	35,00	0,36	0,32
17	Jasa Lainnya	0,58	0,56	0,69	0,71	0,61

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018

Kontribusi masing-masing sektor seperti pada tabel diatas dapat menunjukkan indikator peran masing-masing sektor terhadap PDRB. Dari 17 sektor ekonomi yang ada yang memiliki peran kontribusi tertinggi ialah sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 30,55 persen di tahun 2017, perkembangan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan dan peningkatan yang fluktuatif dari tahun 2013-2017. Berbeda dengan kontribusi tertinggi dari sektor primer yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 26,33 persen ditahun 2016 ditahun 2017

menurun 3% menjadi 23,13 persen. Tahun sebelumnya sector pertanian, kehutanan dan perikanan selalu mengalami kenaikan dalam kontribusi pada PDRB, hanya pada perhitungan perkiraan di tahun 2017 kontribusi PDRB menurun. Kontribusi tertinggi setelah itu ialah sektor Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 15,31 persen ditahun 2016, sama halnya dengan sektor pertanian,kehutanan dan perikanan maka sektor ini juga mengalami penurunan kontribusi di tahun 2017.

4.3. Kondisi Sosial Kabupaten Bangkalan

Kesejahteraan dari Kabupaten Bangkalan akan dilihat dari berbagai aspek yang ada di wilayah tersebut. Aspek –aspek yang bisa melihat keadaan Kabupaten Bangkalan ialah aspek –aspek kependudukan ataupun aspek pendidikan juga kesehatan yang akan membantu mewujudkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Bangkalan. Hasil estimasi dari proyeksi sensus penduduk yang dilakukan maka jumlah penduduk di Tahun 2016 sebanyak 962.773 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan ialah 502.997 jiwa sedangkan jumlah penduduk laki-laki sebesar 459.776 jiwa. Tahun 2017 proyeksi jumlah penduduk meningkat menjadi 971.814 dengan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dari jumlah penduduk laki-laki. Jumlah perempuan sebanyak 507.594 jiwa dan jumlah laki-laki sebesar 464.219 jiwa.

Jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan yang berada pada usia kerja (15 tahun keatas) setaip tahunnya mengalami trend peningkatan. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2016 mencapai 481.352 jiwa. Di tahun 2017 peningkatan angkatan kerja meningkat menjadi 486.521 jiwa. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang disebabkan meningkatnya jumlah penduduk usia kerja perlu mendapatkan perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah. Jumlah lapangan kerja diharapkan dapat disediakan untuk menyerap jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Bangkalan sehingga nantinya akan menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Bangkalan.

Dari segi kesehatan Kabupaten Bangkalan telah mengalami perkembangan tingkat pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan. Dilihat dari sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Bangkalan, fasilitas kesehatan Kabupaten Bangkalan pada tahun 2016 memiliki 2(dua) unit Rumah Sakit, kemudian 22 unit Puskesmas, 69 unit Puskesmas pembantu dan juga tenaga medis yang telah tersedia di Kabupaten Bangkalan untuk bertugas di setiap fasilitas kesehatan yang ada.

Sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Bangkalan disediakan untuk menunjukkan perbaikan disetiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah sekolah dasar (SD) di Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan menjadi 700 unit Sekolah Dasar dari tahun-tahun awal. Jumlah pengajar Sekolah Dasar di Kabupaten Bangkalan juga mencapai 6.322 jiwa.

Kualitas rumah ataupun tempat tinggal masyarakat di Kabupaten Bangkalan semakin lama semakin mengarah pada proses perbaikan. Hal ini tercermin dari semakin banyak masyarakat dari Kabupaten Bangkalan yang menggunakan atap rumah dinding ataupun lantai rumah dengan bahan yang memiliki kualitas yang telah memenuhi syarat. Ditambah lagi dengan fasilitas penunjang rumah seperti penerangan, sumber air minum ataupun fasilitas kamar mandi juga tempat buang air besar ataupun kecil.

4.4. Jumlah Penduduk

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu wilayah di Pulau Madura yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk yang dimiliki Kabupaten Bangkalan meningkat setiap tahunnya. Dilihat dari kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan meningkat sekitar 50 ribu jiwa. Dari tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan tercatat ada 906.761 jiwa meningkat menjadi 962.773 jiwa di tahun 2016. Jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Bangkalan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi ialah Kecamatan Bangkalan dengan jumlah penduduk mencapai 85.187 jiwa sedang Kecamatan dengan jumlah penduduk terendah ialah Kecamatan Tragah dengan jumlah penduduk 28.042 jiwa.

Dengan jumlah penduduk yang tinggi maka Kabupaten Bangkalan dihadapkan pada suatu masalah kependudukan yang cukup serius. Peningkatan jumlah penduduk di setiap tahunnya membuat pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan harus lebih bekerja keras untuk menghadapi masalah tersebut. Oleh karena itu, upaya pengendalian pertumbuhan penduduk disertai dengan upaya peningkatan kesejahteraan penduduk ialah salah satu upaya yang berkesinambungan dengan pembangunan yang terus dilaksanakan.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2017

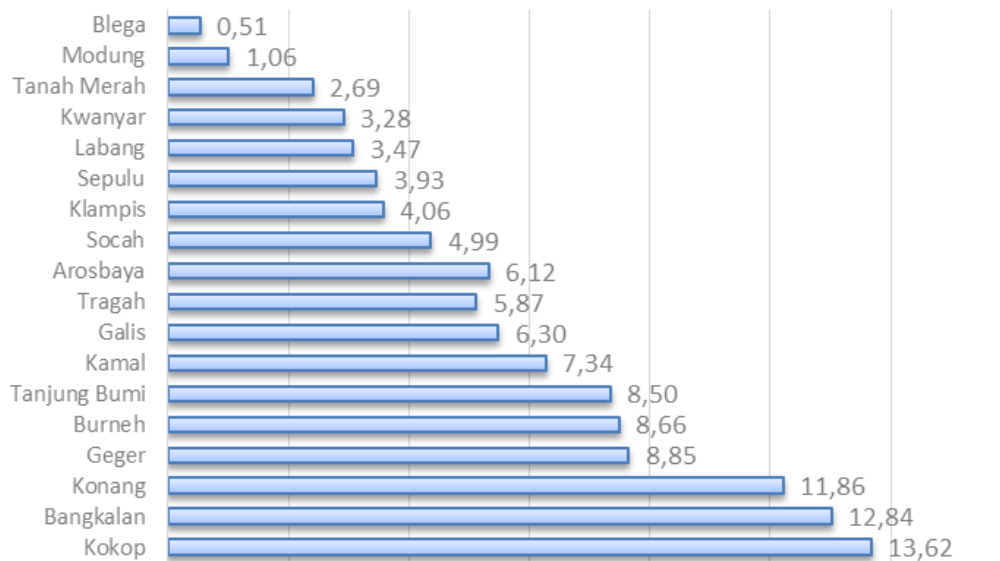
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kokop	61,569	65,819	68,993	73,001	73,743
2	Bangkalan	81,303	84,716	74,595	82,121	82,58
3	Konang	48,246	50,857	52,988	54,741	55,246
4	Geger	72,543	77,005	85,965	71,471	74,783
5	Burneh	60,085	63,234	59,518	59,237	59,914
6	Tanjung Bumi	50,498	53,445	57,419	52,702	52,911
7	Kamal	47,827	49,276	44,113	47,819	48,33
8	Galis	74,811	82,307	92,524	96,767	95,934
9	Tragah	32,822	33,472	33,084	34,625	34,109
10	Arosbaya	47,576	49,883	47,701	46,958	47,242
11	Socah	60,995	62,699	59,816	59,671	60,53
12	Klampus	55,228	58,077	59,941	52,46	53,433
13	Sepulu	42,332	45,304	48,075	42,211	43,52
14	Labang	37,721	38,935	34,766	40,041	39,522
15	Kwanyar	51,553	53,454	47,218	53,31	53,013
16	Tanah Merah	72,091	76,289	78,765	78,205	77,222
17	Modung	50,177	51,163	51,934	52,103	51,209
18	Blega	58,631	61,428	61,563	64,989	64,117
Jumlah	Kabupaten Bangkalan	1,006,008	1,057,363	1,058,978	1,062,432	1,067,358

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan 2018

Data jumlah penduduk mencatat bahwa jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebanyak 1,067,358 jiwa dengan kecamatan yang paling padat penduduknya yaitu di kecamatan 95,934 jiwa. Sementara itu, kecamatan yang paling sedikit penduduknya yaitu di Kecamatan Tragah yaitu sebanyak 34,109 jiwa. Secara umum rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan setiap tahunnya sebesar 0,31%.

Hasil sensus penduduk tahun 2010 mencatat laju pertumbuhan Kabupaten Bangkalan per tahun selama sepuluh tahun yakni tahun 2000-2010 sebesar 1,46 persen. Hasil sensus penduduk Kabupaten Bangkalan mengalami laju pertumbuhan yang bervariasi, pada tahun 2010-2017 laju pertumbuhan Kabupaten Bangkalan mencapai 6,76 persen. Laju pertumbuhan pada tahun 2017 terbesar di Kabupaten Bangkalan ialah Kecamatan Kokop dengan jumlah sebesar 1,73 persen sedangkan Kecamatan Bangkalan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi hanya memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,63 persen, peringkat terakhir laju pertumbuhan penduduk kecamatan di Kabupaten Bangkalan ialah kecamatan Kecamatan Blega sebesar -0,02 persen.

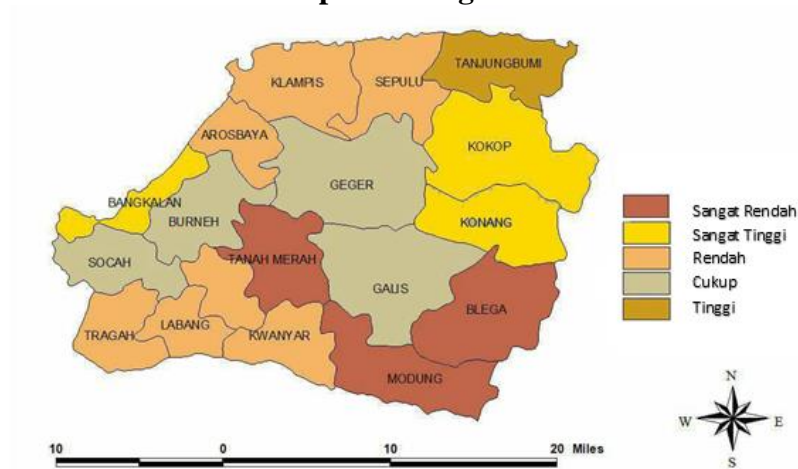
Gambar 2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangkalan Tahun 2010-2017



Sumber : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018 (diolah)

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bangkalan dipetakan menjadi lima kelas menurut jumlah laju pertumbuhan penduduk, hasil interval dalam masing-masing kelas tersebut dihitung dan digolongkan dari 0,51 persen terendah sampai yang tertinggi yaitu laju pertumbuhan 13,62 persen dengan masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Adapun gambaran pemetaan laju pertumbuhan penduduk sebagai berikut:

Gambar 3. Pemetaan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangkalan Tahun 2017

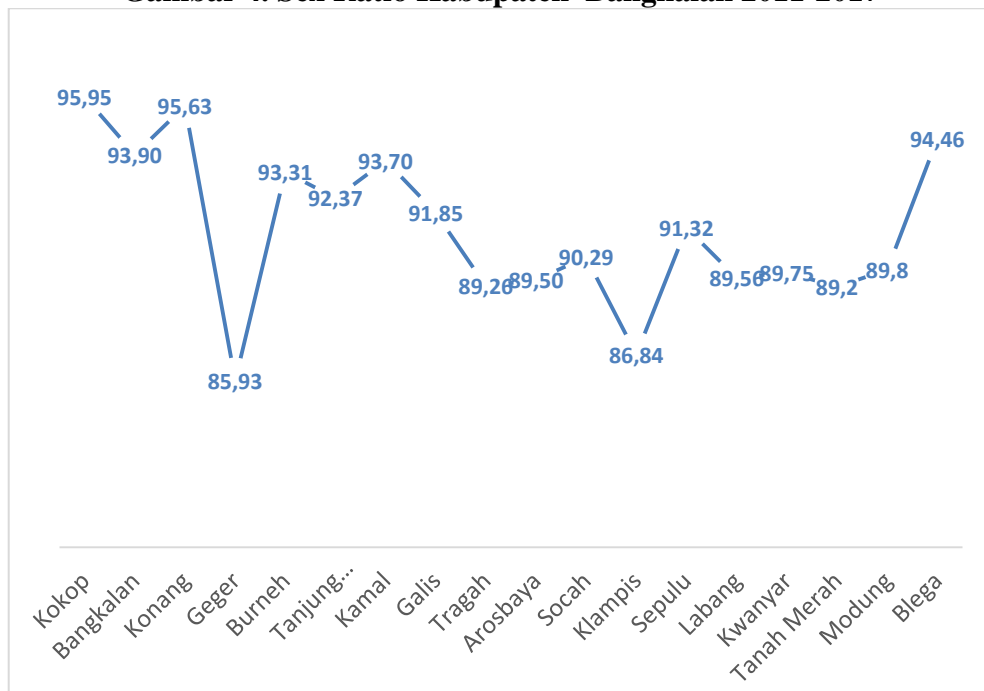


Sumber : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018 (diolah)

4.5. Sex Ratio

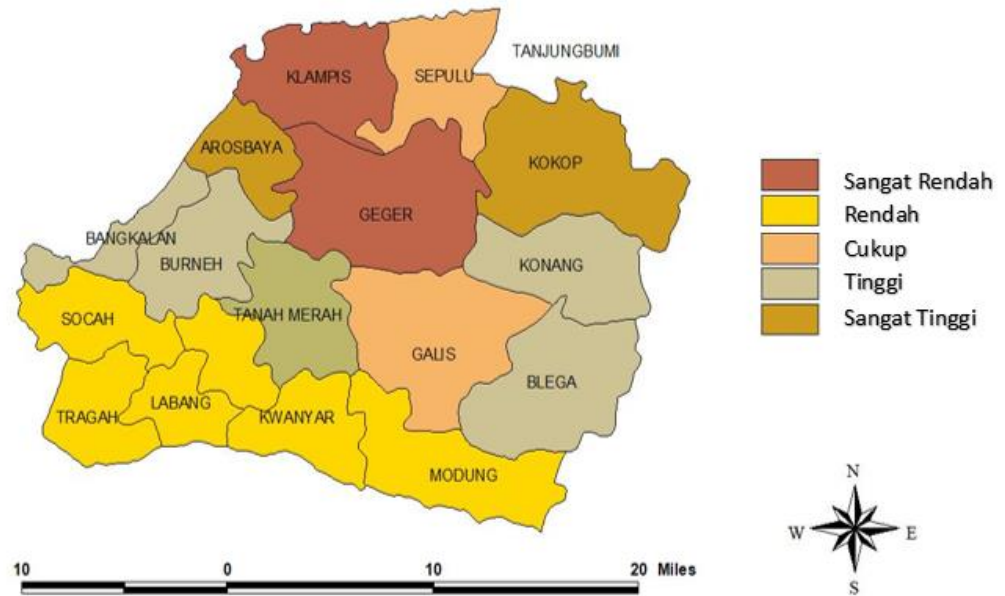
Kabupaten Bangkalan memiliki jumlah penduduk yang tinggi dengan jumlah penduduk perempuan yang memang lebih tinggi dari jumlah penduduk laki-laki. Secara agregat dilihat dari sex ratio penduduk di Kabupaten Bangkalan ada tahun 2016 adalah sebesar 91,41 lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang berkisar 91,39, ini artinya penduduk laki-laki 8,59 persen lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan Kabupaten Bangkalan. Setiap 100 perempuan hanya terdapat sekitar 92 laki-laki. Sex ratio terbesar terdapat di Kecamatan Kokop dengan jumlah sex ratio sebesar 95,91, sedang Kecamatan dengan sex ratio terkecil adalah Kecamatan Geger dengan sex ratio sebesar 85,89.

Gambar 4. Sex Ratio Kabupaten Bangkalan 2011-2017



Sumber : *Bangkalan Dalam Angka, 2018 (diolah)*

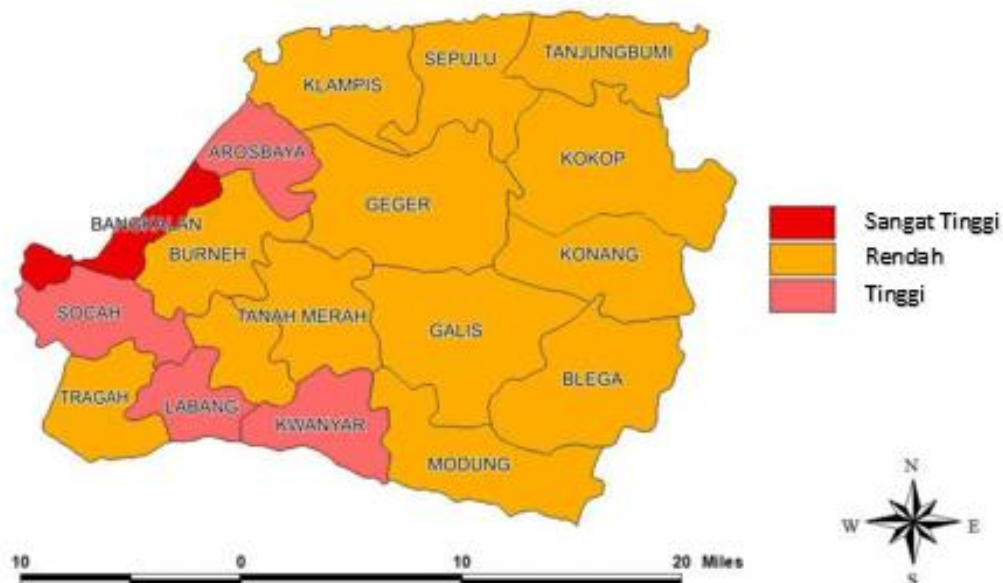
Sex ratio penduduk di Kabupaten Bangkalan dipetakan menjadi lima kelas menurut jumlah laju pertumbuhan penduduk, hasil interval dalam masing-masing kelas tersebut dihitung dengan membagi jumlah data dengan kelas yang ada, kemudian digolongkan dari 85,93 persen terendah sampai yang tertinggi yaitu laju pertumbuhan 95,95 persen dengan masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Adapun gambaran pemetaan sex ratio penduduk Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

Gambar 5. Pemetaan Sex Ratio Kabupaten Bangkalan 2011-2017

Sumber : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018 (diolah)

4.6. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk di Kabupaten Bangkalan belum merata, hal ini dapat dilihat dari penyebaran penduduk antar Kecamatan tampak masih cukup timpang, sehingga kepadatan untuk masing-masing Kecamatan belum merata. Kepadatan penduduk biasanya terpusat di daerah perkotaan dengan jumlah fasilitas yang memadai, sehingga mengundang penduduk wilayah pedesaan untuk berpindah ke daerah kota. Masalah yang sering timbul yang di akibatkan oleh kepadatan penduduk terutama mengenai perumahan, kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, setidaknya pembangunan yang dilaksanakan harus berkaitan dengan daya dukung lingkungan dan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas bagi penduduk setempat sehingga tidak menimbulkan urbanisasi.

Gambar 6. Persebaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Bangkalan

Sumber : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018 (diolah)

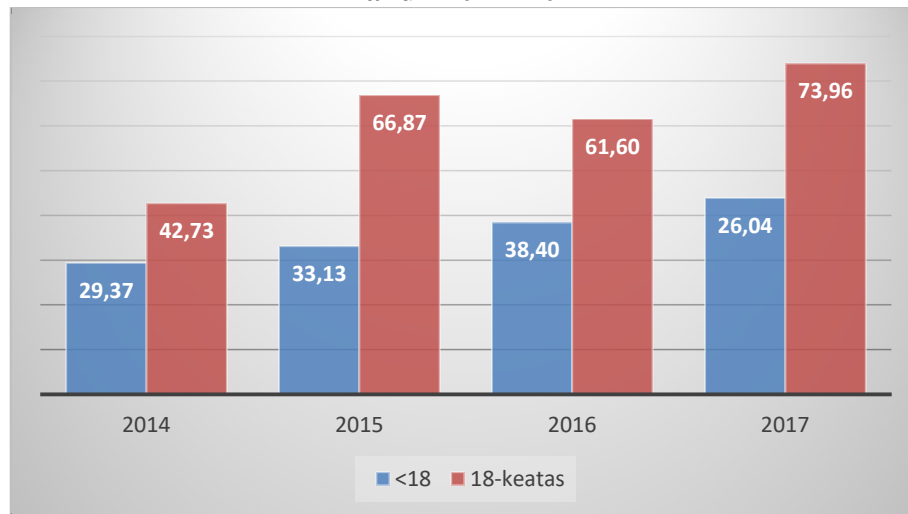
Tidak meratanya persebaran penduduk di Kabupaten Bangkalan menyebabkan kepadatan penduduk menurut kecamatan sangat bervariasi. Dari gambar di atas dapat diketahui kepadatan penduduk dengan skala dari 200-2000 orang di masing-masing kecamatan. Kecamatan Bangkalan sebagai ibu kota Kabupaten memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu 2.432 orang per km² sedangkan Kecamatan lain di Kabupaten Bangkalan memiliki kepadatan penduduk yang jauh lebih kecil berkisar 500 orang per km². Selain Kecamatan Bangkalan kepadatan penduduk di Kecamatan yang memiliki jumlah kepadatan penduduk yang mencapai 1000 orang per km² adalah Kecamatan Kamal, Kecamatan Soeah dan Kecamatan Arosbaya. Kecamatan Galis yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi dapat diimbangi dengan luas wilayahnya yang besar sehingga jumlah kepadatan penduduk di Kecamatan Galis hanya mencapai 637 orang per km², sedangkan kepadatan penduduk terendah di Kabupaten Bangkalan ialah Kecamatan Geger sebesar 549 orang per km².

4.7. Umur Perkawinan Pertama

Usia 15-49 tahun merupakan usia subur bagi seorang perempuan karena pada rentang usia tersebut kemungkinan perempuan untuk melahirkan anak cukup besar. Penundaan usia perkawinan pertama pada perempuan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat fertilitas, karena akan berdampak memperpendek masa reproduksi mereka. Disamping itu perempuan yang kawin pada usia yang sangat muda memiliki resiko yang cukup besar pada saat mengandung dan melahirkan yang berdampak pada keselamatan ibu dan anak. Dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bersekolah lebih tinggi dapat membantu menunda usia perkawinan bagi seorang perempuan.

Di Kabupaten Bangkalan masih banyak perempuan yang menikah dibawah umur 18 tahun. Namun trend setiap tahunnya mengalami peningkatan. Perbandingan yang ditampilkan hanya pada usia perkawinan bagi perempuan dengan usia dibawah 18 tahun dan diatas 18 tahun. Ditahun 2015 penduduk usia perkawinan pada usia 19-24 tahun mencapai 61,10 persen. Namun jika dikelompokkan dalam usia 18 tahun keatas maka jumlah persentase pada tahun 2015 adalah 66,87 persen. Tahun 2017 persentase usia perkawinan menjadi 73,96 persen untuk wanita dan pria sebesar 43,91 persen Berikut adalah gambaran persentase usia perkawinan di Kabupaten Bangkalan.

Gambar 7. Persentase Usia Perkawinan Pertama Kabupaten Bangkalan Tahun 2014- 2017

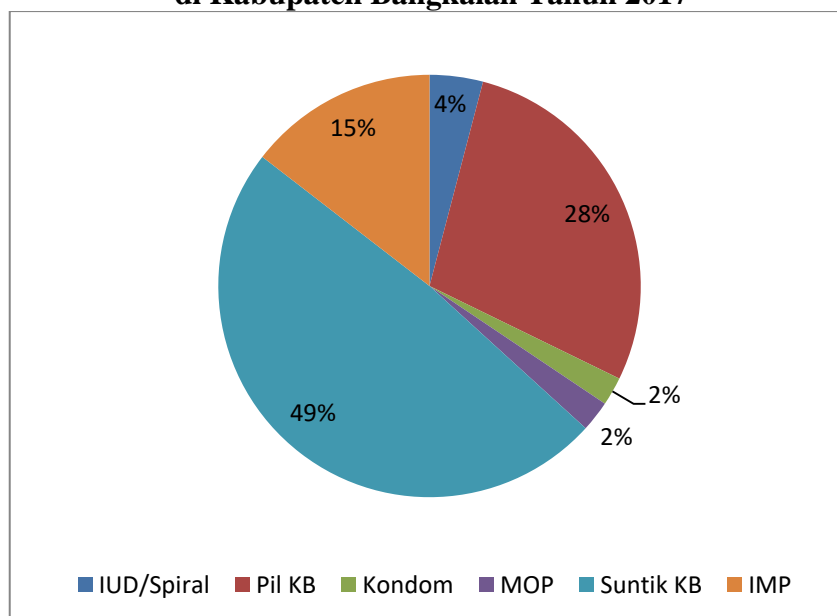


Sumber : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018 (diolah)

4.8. Penggunaan Alat/Cara Kontrasepsi

Jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan yang meningkat setiap tahunnya mendapat perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Bangkalan. Upaya pengendalian jumlah penduduk dilakukan dengan program KB dengan sasaran pasangan usia subur sedang digalakkan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Usia tahun 15-49 tahun merupakan usia subur bagi perempuan, karena pada kelompok usia tersebut cukup besar peluang kaum perempuan untuk bisa hamil dan melahirkan anak. Pada kelompok inilah perlu diberlakukan program KB. Penggunaan alat/cara KB secara efektif, selain bermanfaat untuk membatasi jumlah anak yang dilahirkan juga dapat mengatur jarak kelahiran antar anak.

Gambar 7. Persentase Penggunaan Alat/Cara KB di Kabupaten Bangkalan Tahun 2017



Sumber : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018 (diolah)

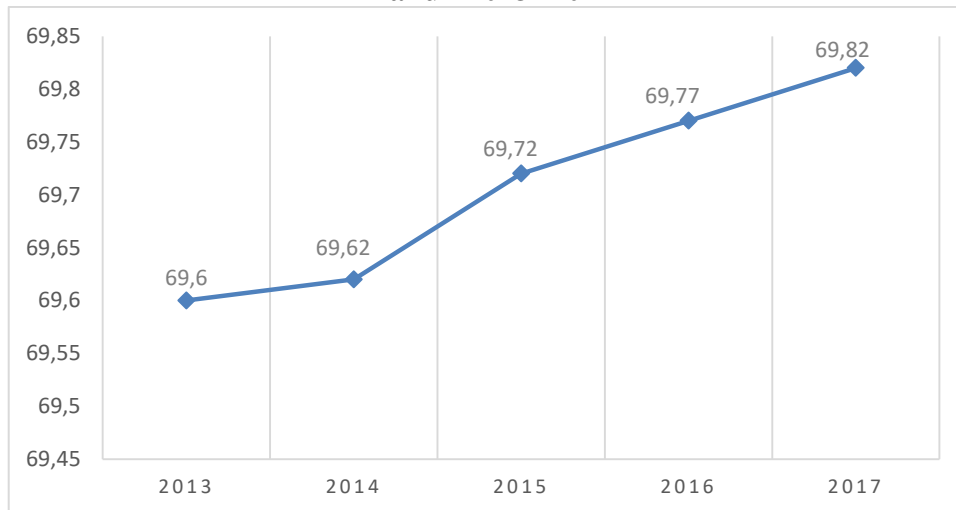
Penggunaan alat/cara KB di Kabupaten Bangkalan masih didominasi dengan penggunaan suntik KB, penggunaan pil dan suntik KB memiliki jumlah terbanyak dibandingkan dengan alat/cara lainnya. Sekitar 49 persen perempuan usia 15-49 tahun di Kabupaten Bangkalan menggunakan alat/cara KB dengan suntik dan 28 persennya menggunakan alat/cara pil KB, sedangkan 23 persen perempuan lainnya menggunakan alat/cara KB yang lain.

4.9. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Jumlah kematian bayi di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2015 jumlah kematian bayi hanya sekitar 16 kasus sedangkan pada tahun 2016 angka kematian bayi meningkat menjadi 142 kasus. Berarti ada sekitar 9 kematian bayi diantara 1000 kelahiran bayi. Namun dari data yang ada angka harapan hidup di Kabupaten Bangkalan meningkat dari tahun ke tahun sebelumnya pada tahun 2016 dari 69,77 menjadi 69,82 persen ditahun 2017. Peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Bangkalan sedikit demi sedikit di setiap tahunnya. Angka

harapan hidup Kabupaten Bangkalan dilihat dari trend setiap tahunnya mengalami peningkatan walaupun angka kematian bayi di Kabupaten Bangkalan juga meningkat. Adapun kondisi angka harapan hidup di Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

Gambar 9. Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangkalan Tahun 2013- 2017



Sumber : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018 (diolah)

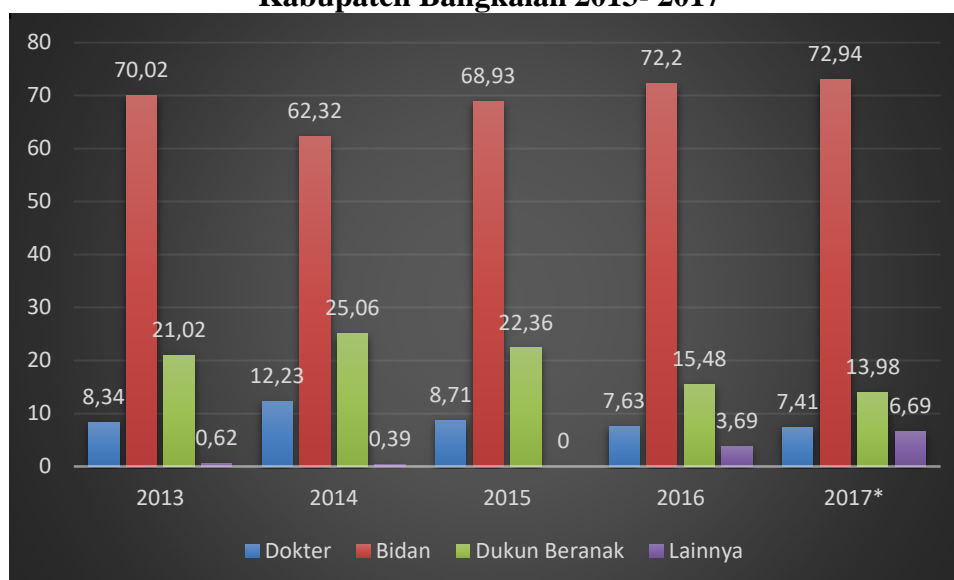
Tingkat kesehatan suatu wilayah juga dapat dilihat dari status kesehatan penduduk yang dapat menggambarkan situasi kesehatan yang ada. Data yang digunakan ialah berupa jumlah masyarakat yang mengalami keluhan sakit dan juga gangguan sakit, adapun jumlah masyarakat yang mengalami keluhan sakit ialah sebesar 23,66 persen dan gangguan sakit sebesar 54,73 persen. Tingkat kesehatan masyarakat juga diukur dengan sebesar lama masyarakat sakit, dari data yang ada diketahui jumlah penduduk yang sakit menurut jumlah hari terbesar adalah berkisar kurang dari 4 hari dengan persentase 50,22 persen sedang untuk hari sakit 22-30 hari hanya berkisar 1,98 persen.

4.10. Penolong Persalinan

Salah satu yang dapat mempengaruhi kematian bayi ialah proses persalinan yang dilakukan ataupun dipilih, dalam proses kelahiran faktor penolong sangat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayi. Kesalahan dalam penanganan pada saat melahirkan ataupun pasca melahirkan dapat berakibat fatal

bagi kesehatan ibu dan juga bayi. Persalinan yang dilakukan dengan bantuan medis dianggap lebih baik dibandingkan oleh tenaga non medis seperti dukun bayi ataupun lainnya. Terjadi peningkatan persentase penolong proses kelahiran bayi di Kabupaten Bangkalan, peningkatan ini sangat signifikan, jumlah penolong persalinan dengan bantuan tenaga medis pada tahun 2016 mencapai 79,83 persen terdiri dari tenaga dokter dan juga Bidan , persentase pertolongan menurut tenaga medis oleh bidan sebesar 72,20 persen sedangkan pertolongan persalinan dengan dukun beranak hanya berkisar 3,69. Di tahun 2017 meningkat menjadi 72,94 dari proses kelahiran bidan sedangkan dari pertolongan dukun beranak menurun menjadi 13,98 persen.

Gambar 10. Persentase Pertolongan Persalinan Kabupaten Bangkalan 2013- 2017



Sumber : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018 (diolah)

Peningkatan yang signifikan ini berarti baik bagi masyarakat Kabupaten Bangkalan, hal ini berarti penduduk Kabupaten Bangkalan saat ini sudah mulai sadar dengan pentingnya proses pertolongan kelahiran bayi dengan proses medis. Dengan proses medis keselamatan ibu dan bayi saat melahirkan ataupun pasca melahirkan masih dapat dipantau dengan pengetahuan yang cukup dibidang kesehatan bagi para medis.

4.11. Fasilitas Kesehatan

Peningkatan kesehatan yang ingin diwujudkan pemerintah harus sesuai dengan upaya penyediaan kesehatan bagi masyarakat dalam bentuk fasilitas kesehatan yang ada. Fasilitas kesehatan tersebut akan membantu pemerintah untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Bangkalan, selain itu fasilitas tersebut harus dapat di jangkau oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Bangkalan yang ada atau pun yang berada di pelosok daerah. Rumah sakit Kabupaten Bangkalan ada 2 unit, kurangnya jumlah rumah sakit di Kabupaten Bangkalan mengharuskan fasilitas penunjang kesehatan lain yaitu puskesmas untuk memudahkan masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan di daerah pelosok. Pada tahun 2017 Jumlah rumah Sakit 2 unit, Puskesmas Rawat Inap 22 unit, Jumlah puskesmas pembantu sebanyak 68 unit, Puskesmas keliling 51 unit, Rumah Bersalin 1 unit dan Praktik Dokter sebanyak 31 unit.

Tabel 4. Fasilitas Kesehatan Tahun 2017

Fasilitas Kesehatan	Jumlah
Rumas Sakit	2
Puskesmas Rawat Inap	22
Puskesmas Pembantu	68
Puskesmas Keliling	51
Rumah Bersalin	1
Praktik Dokter	31

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan 2018

4.12. Jenis/Cara Pengobatan

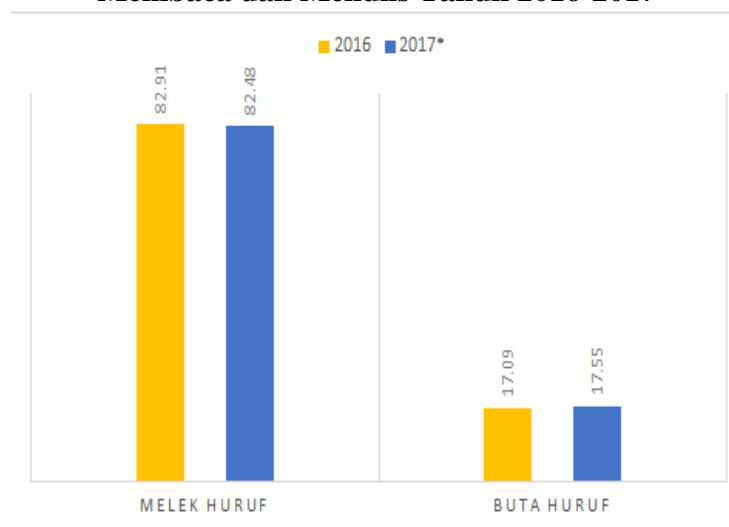
Penduduk yang mengalami gangguan kesehatan pada umumnya melakukan upaya pengobatan baik dengan cara mengobati sendiri, berobat jalan ataupun rawat inap. Persentase penduduk yang menggunakan cara mengobati sendiri pada tahun 2015 mencapai 74,84 persen. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk mengobati sendiri lebih tinggi dari pada harus rawat inap ataupun berobat jalan. Pada tahun 2016 jumlah persentase rawat inap penduduk Kabupaten Bangkalan untuk laki-laki sebesar 2,01 sedangkan untuk perempuan adalah 3,78 persen. Pengobatan masyarakat sendiri ditahun 2016 meningkat menjadi 75,19 persen. Persentasen pengobatan sendiri masyarakat ditahun 2017

turun menjadi 56,74 untuk laki-laki dan 60,19 persen untuk perempuan dengan pembagian sebagai table berikut:

4.13. Angka Melek Huruf

Pembangunan di bidang pendidikan menjadi salah satu hal yang penting dalam pembangunan wilayah. Pendidikan juga menjadi salah satu kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut, selain itu kemajuan sosial ekonomi masyarakat juga akan diukur dengan tingkat pendidikan yang ada. Ukuran dasar dari pendidikan seseorang adalah kemampuan individu tersebut untuk membaca atau pun menulis. Kemampuan baca-tulis adalah kemampuan pendidikan minimum yang harus dimiliki oleh setiap individu, ukuran dasar tingkat pendidikan dilihat dari umur 15 tahun keatas. Angka buta huruf juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan antar wilayah, mengingat buta huruf cenderung identik dengan keterbelakangan serta ketidakberdayaan yang umumnya menjadi ciri khas masyarakat terbelakang.

Gambar 11. Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Tahun 2016-2017



Sumber : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018 (diolah)

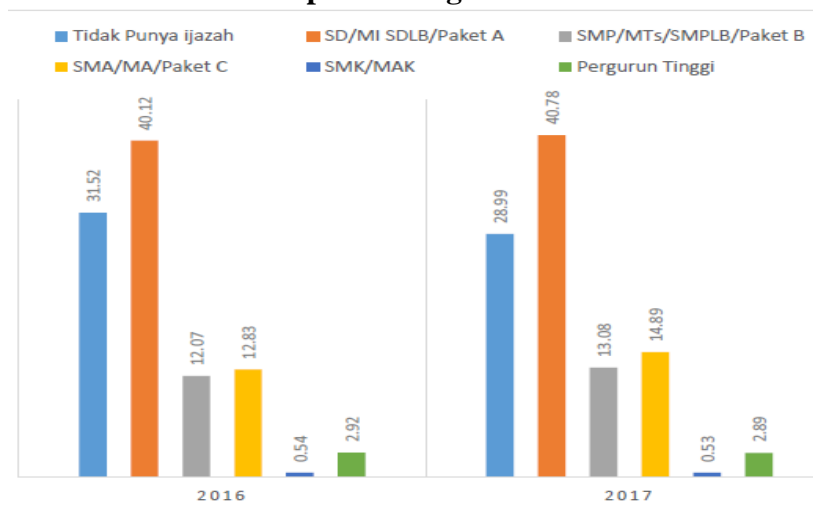
Kemampuan baca tulis penduduk dewasa merupakan ukuran yang sangat mendasar dari sisi pendidikan, yang tercermin dari data melek huruf yaitu persentase jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca huruf latin

dan huruf lainnya, persentase penduduk laki-laki melek huruf di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 adalah 89,51 persen dan turun menjadi 88 persen di tahun 2016 sedang angka melek huruf perempuan juga turun menjadi 78,49 persen dari tahun 2015 yang mencapai 80,65 persen. Angka buta huruf pada tahun 2016 meningkat menjadi 12 persen bagi laki-laki dan 21,51 persen untuk perempuan. Tahun 2017 dapat dilihat bahwa jumlah angka buta huruf menjadi 17,55 dan angka melek huruf menjadi 82,48 persen. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah mengingat jumlah buta huruf yang semakin meningkat sedangkan jumlah penduduk melek huruf justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Perbaikan kualitas pendidikan perlu ditingkatkan sehingga jumlah buta huruf bisa ditekan dan meningkatkan jumlah melek huruf sehingga kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Bangkalan meningkat dengan pendidikan yang baik pula.

4.14. Tingkat Pendidikan

Peningkatan sumber daya manusia dari segi pendidikan dapat dilihat dari gambaran tingkat pendidikan yang dilakukan. Kualitas pendidikan dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri, peningkatan sumber daya manusia suatu wilayah dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas. Tahun 2017 penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat dari tahun 2016, peningkatan di tahun 2017 sedikit demi sedikit tamatan sekolah dasar di tahun 2017 meningkat menjadi 40,78 persen dari 40,12 persen di tahun 2016. Berikut ini adalah gambaran data masyarakat yang sudah menamatkan jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi.

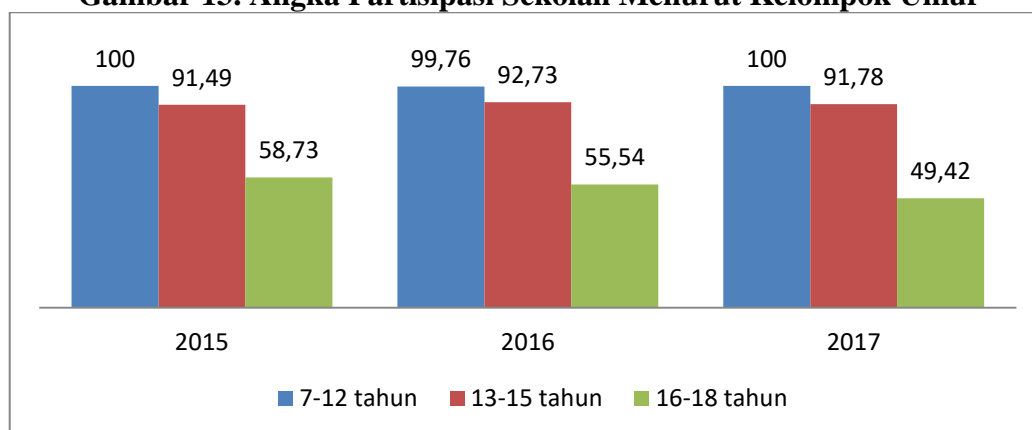
Gambar 12. Persentase Jumlah Penduduk Menurut Sekolah Yang di Tamatkan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 -2017



Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018 (diolah)

4.15. Tingkat Partisipasi Sekolah

Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada dapat dilihat dari persentase penduduk yang masih bersekolah pada umur tertentu yang lebih di kenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di sekolah di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. APS mempunyai keunggulan dapat mencerminkan partisipasi/akses pendidikan sesuai kelompok usia sekolah sehingga jelas menggambarkan seberapa besar penduduk yang sedang menikmati pendidikan. Tetapi kelemahannya, APS tidak dapat melihat dijenjang apa seseorang tersebut bersekolah/menikmati pendidikan.

Gambar 13. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur

Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018 (diolah)

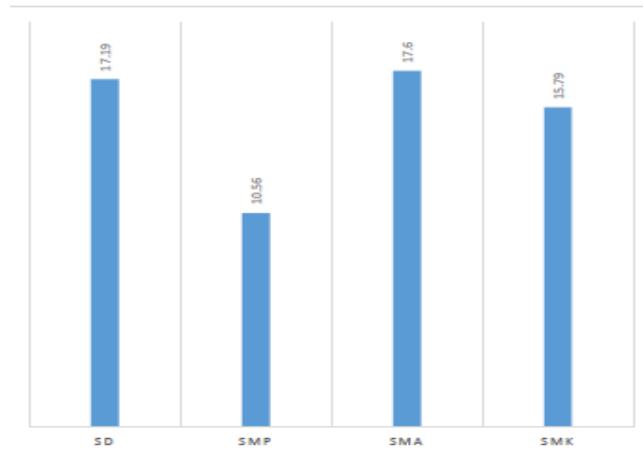
Dari gambar 13 menunjukkan semakin tinggi umur maka semakin kecil tingkat partisipasi sekolah, mengindikasikan bahwa masih banyak penduduk yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka partisipasi sekolah anak usia 7 - 12 tahun (usia SD) di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2016 turun menjadi 99,76 persen dari tahun lalu 100 persen. Pada kelompok umur 13 – 15 tahun (usia SLTP) angka partisipasi sekolah sedikit lebih rendah yaitu 92,73 persen namun pada kelompok umur 16 -18 tahun angka partisipasi sekolah baru mencapai 55,54 persen turun dari tahun 2015 menjadi 58,73 persen.

4.16. Fasilitas Pendidikan

Semakin meningkatnya angka partisipasi sekolah, khususnya untuk jenjang pendidikan SD dan SLTP harus di ikuti dengan meningkatnya fasilitas pendidikan, terutama mengenai daya tampung sekolah, sehingga program wajib belajar 9 tahun yang di canangkan oleh pemerintah dapat berhasil. Guna mengatasi kekurangan daya tampung pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan seperti menambah pembangunan unit gedung baru dengan prioritas pada daerah yang angka partisipasi sekolahnya masih rendah dan daerah terpencil dan merehabilitasi gedung-gedung SD dan SLTP dengan prioritas gedung yang rusak berat serta mengangkat guru baru untuk di tempatkan pada sekolah yang kekurangan guru. Tingkat kecukupan sarana dan prasarana

pendidikan dapat dilihat melalui rasio siswa terhadap jumlah sekolah dan rasio murid terhadap Guru. Gambar 14 menunjukkan rasio siswa terhadap guru menunjukkan setiap 1 orang guru dapat mengajar 17 murid SD, 17 murid SMA juga 10 murid di SMP.

Gambar 14. Rasio Murid-Guru di Kabupaten Bangkalan Tahun 2017



Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018 (diolah)

4.17. Angka Beban Ketergantungan

Pembangunan dapat memberikan dampak diseluruh aspek baik sosial ataupun ekonomi. Dampak keberhasilan pembangunan dibidang kependudukan misalnya dapat dilihat dari perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 tahun keatas) yang berarti semakin rendah angka beban tanggungan. Semakin kecil angka ketergantungan maka akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Selama periode 2010-2016 angka beban ketergantungan di Kabupaten Bangkalan setiap tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2012 rata-rata dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 56 penduduk tidak produktif, tahun tahun berikutnya angka beban ketergantungan fluktuatif hingga pada tahun 2015 sampai 2016 ini turun menjadi 53,4 persen, sedangkan beban ketergantungan di tahun 2017 turun hanya sedikit yaitu 53,36 persen.

4.18. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah proporsi penduduk usia kerja yang angka TPAK merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja, kebutuhan penduduk untuk bekerja dan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan demografis merupakan besaran-besaran yang mempengaruhi tingkat TPAK.

Data menunjukkan bahwa tingkat TPAK di Kabupaten Bangkalan tahun 2016 masih sama dengan tahun lalu yaitu 69,64 persen sedangkan ditahun 2017 meningkat menjadi 77,19 persen hal ini menunjukkan berarti ada sekitar 30,36 persen dari penduduk Kabupaten Bangkalan dalam usia produktif yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi di tahun 2016 dan 23,81 persen masyarakat yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi di tahun 2017. Golongan yang masuk dalam kriteria ini adalah penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga.

4.19. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Peningkatan penawaran tenaga kerja tidak selalu diikuti dengan peningkatan yang memadai dari permintaan tenaga kerja karena terbatasnya lapangan kerja yang ada. Sebagai akibatnya, sebagian tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan atau menjadi pengangguran. Pengangguran merupakan persoalan yang dilematis, dimana pemerintah atau instansi yang mengurus ketenagakerjaan sebenarnya mampu mengurangi ataupun menekan angka pengangguran maka akan terjadi implikasi lainnya di sektor ekonomi.

Berdasarkan teori ekonomi menyatakan bahwa jika perekonomian berada di bawah *full employment* maka pendapatan dapat di tingkatkan melalui peningkatan pada pengeluaran pemerintah atau dengan menurunkan pajak. Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa usaha untuk menekan pengangguran mengakibatkan terjadinya peningkatan biaya pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak yang diterima oleh pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan disetiap Negara maju mempunyai kewajiban untuk menyediakan tunjangan bagi para pengangguran. Dan bagi Negara yang masih

berkembang, pengangguran merupakan persoalan yang sangat kompleks untuk diselesaikan. Dan akhirnya pengangguran ada prinsipnya mengandung arti hilangnya output dan kesengsaraan bagi orang yang tidak bekerja dan merupakan suatu bentuk pemborosan sumber daya ekonomi.

Tingkat pengangguran di tahun 2014-2015 di Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan dari 5,68 persen menjadi 5,00 persen, sedangkan ditahun 2016 tingkat pengangguran di Kabupaten Bangkalan masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 5,00 persen. Ditahun 2017 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bangkalan di prediksi menurun menjadi 45,04 persen. Tingkat pengangguran yang menurun berarti menggambarkan bahwa sektor ekonomi di Kabupaten Bangkalan di tahun 2016 berhasil menyerap tenaga kerja baru.

Tingkat pengangguran di Kabupaten Bangkalan di indikasikan mempunyai ciri bahwa TPT di daerah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Diduga, hal ini disebabkan karena di daerah pedesaan didominasi oleh sektor ekonomi pertanian jadi penyerapan tenaga kerja di desa relatif lebih tinggi. Penduduk usia kerja dengan mudah dapat bekerja di sektor pertanian meskipun sebagai pekerja keluarga atau pekerja bebas karena pada tingkat pekerjaan ini tidak perlu memiliki keahlian atau pendidikan yang tinggi. Sebaliknya di daerah perkotaan, lapangan kerja formal lebih selektif dalam menerima tenaga kerja khususnya dengan tingkat pendidikan yang sudah disyaratkan.

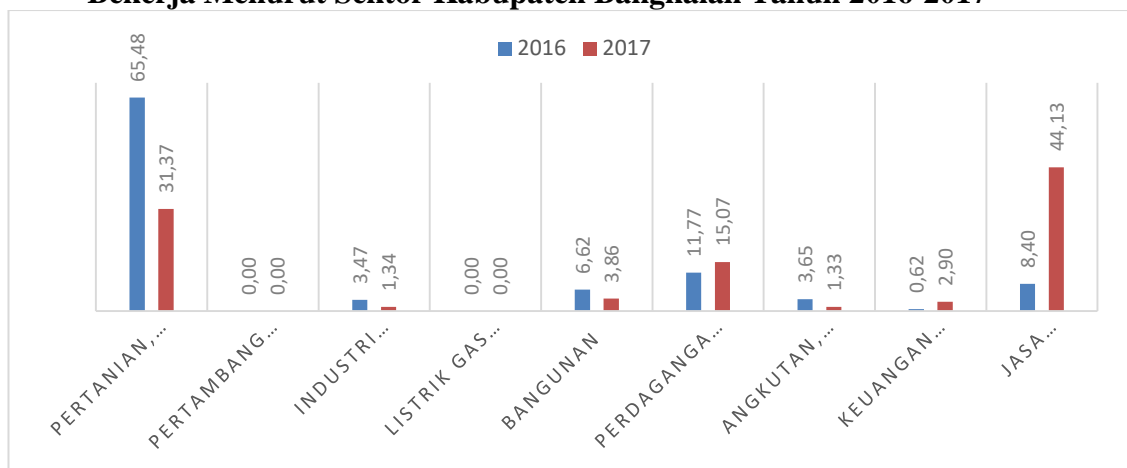
4.20. Lapangan Usaha

Data tentang distribusi sektoral tentang penyerapan tenaga kerja dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kemampuan sektor-sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja sekaligus sebagai tolak ukur kemajuan perekonomian suatu daerah. Tahapan kemajuan perekonomian suatu Negara dari tradisional menuju Negara industri salah satunya ditandai dengan adanya transformasi sektoral tenaga kerja dari sektor primer dengan produktivitas rendah ke sektor-sektor dengan produktivitas lebih tinggi yaitu sektor sekunder dan tersier, sehingga persentase tenaga kerja di sektor primer akan menurun dan sebaliknya ada sektor sekunder dan tersier akan meningkat.

Kabupaten Bangkalan masih tetap seperti tahun –tahun sebelumnya dari segi lapangan kerja yang disediakan oleh sektor ekonomi yang ada masih terpusat di sektor pertanian. Data Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor ekonomi saat ini masi didominasi oleh sektor primer. Hal ini disebabkan bahwa jumlah penduduk memilih untuk bekerja disektor pertanian karena pada sektor tersebut tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi.

Namun di tahun 2017 diprediksi jumlah penduduk di sektor pertanian akan turun sedangkan yang meningkat adalah pada sektor jasa, apabila persentase jumlah penduduk yang bekerja pada sektor jasa bertambah maka Kabupaten Bangkalan mengalami pergeseran ke struktur ekonomi di sektor tersier.

Gambar 15. Persentase Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Kabupaten Bangkalan Tahun 2016-2017



Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018 (diolah)

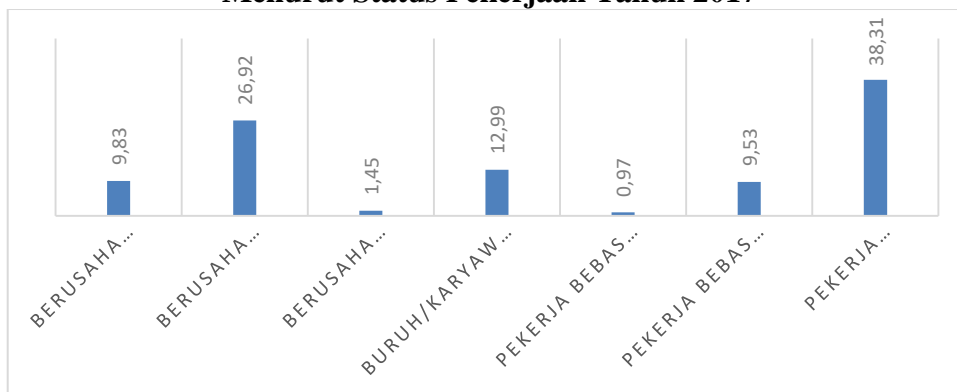
Kabupaten Bangkalan mencerminkan sebuah Kabupaten yang masih tergolong dalam daerah agraris dengan jumlah tenaga kerja yang banyak pada sektor pertanian, sedangkan sektor yang berada diperingkat kedua setelah pertanian dalam membuka lapangan kerja ialah sektor perdagangan besar,eceran rumah makan dan hotel. Dilihat dari Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan di tahun 2015 penyerapan tenaga kerja pertanian berasal dari Kecamatan Kokop. Sementara Kecamatan Bangkalan memiliki persentase penyerap tenaga kerja terbanyak disektor jasa dan lainnya.

4.21. Status Pekerjaan

Data tentang distribusi status tenaga kerja juga dapat di gunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kemajuan perekonomian suatu daerah. Tenaga kerja yang berstatus sebagai pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga tentunya berkontribusi secara ekonomi terhadap pendapatan suatu rumah tangga.

Dari gambar 16 dapat dilihat jumlah tenaga kerja yang dilihat dari status pekerjaan, data tersebut menunjukkan bahwa proporsi jumlah tenaga kerja keluarga sangat tinggi dibandingkan dengan status pekerjaan lain. Status penduduk yang bekerja sebagai buruh atau pegawai dan karyawan pun masih dibawah dari status penduduk yang berusaha dengan dibantu buruh persentase jumlah pegawai atau karyawan hanya berkisar 12,99 persen jauh lebih rendah dari persentase pekerja keluarga yang mencapai 38,31 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor informal masih sangat mendominasi struktur tenaga kerja Kabupaten Bangkalan.

Gambar 16. Persentase Jumlah Penduduk 15 tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2017



Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018 (diolah)

4.22. Kualitas Rumah Tangga

Rumah merupakan tempat berkumpulnya bagi semua anggota keluarga sebagai tempat berlindung dan berkumpul maka aspek kualitas perumahan harus dipertimbangkan dalam sebuah perumahan. Salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kesehatan perumahan diantaranya adalah luas lantai rumah/tempat tinggal. Luas lantai rumah tempat tinggal selain digunakan sebagai indikator

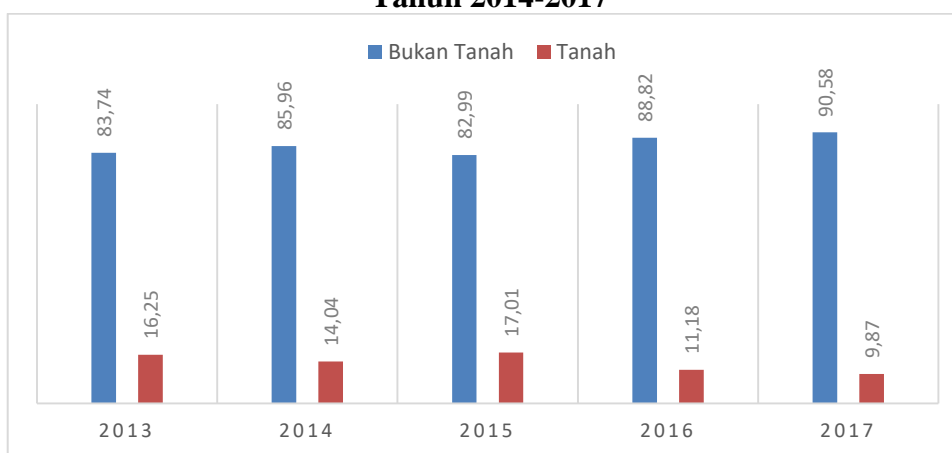
untuk menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga dikaitkan dengan sistem kesehatan lingkungan keluarga atau tempat keadaan hunian.

Mayoritas rumah tangga di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2016 yang memiliki tempat tinggal sendiri mencapai 96 persen sedang lainnya masih tinggal secara kontrak. Luas rumah yang dihuni sebanyak 7,98 persen tinggal dengan luas hunian/tempat tinggal sebesar $<7,2\text{m}^2$, sedangkan sebesar 92,02 persen tinggal pada hunian atau tempat tinggal dengan luas $>7,2\text{ m}^2$.

Selain itu luas jemis lantai juga digunakan sebagai indikator untuk melihat kualitas perumahan. Semakin baik kualitas lantai perumahan dapat diasumsikan semakin membaik tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang tinggal dengan rumah yang berlantai tanah maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat tersebut, karena tanah adalah salah satu media penularan penyakit.

Pada tahun 2014 tercatat 85,96 persen rumah tangga di Kabupaten Bangkalan tidak menggunakan tanah sebagai lantai rumah mereka, angka ini menurun pada tahun 2015 menjadi 82,99 persen tahun 2015. Namun pada tahun 2016 dan 2017 angka tersebut naik melebihi tahun 2014 yaitu 88,82 persen dan 90,58 persen rumah yang tidak beralaskan tanah sebagai lantainya, sedangkan 9,87 persen di tahun 2017 rumah masih beralaskan tanah.

Gambar 17. Kualitas Rumah Berdasarkan Lantai di Kabupaten Bangkalan Tahun 2014-2017



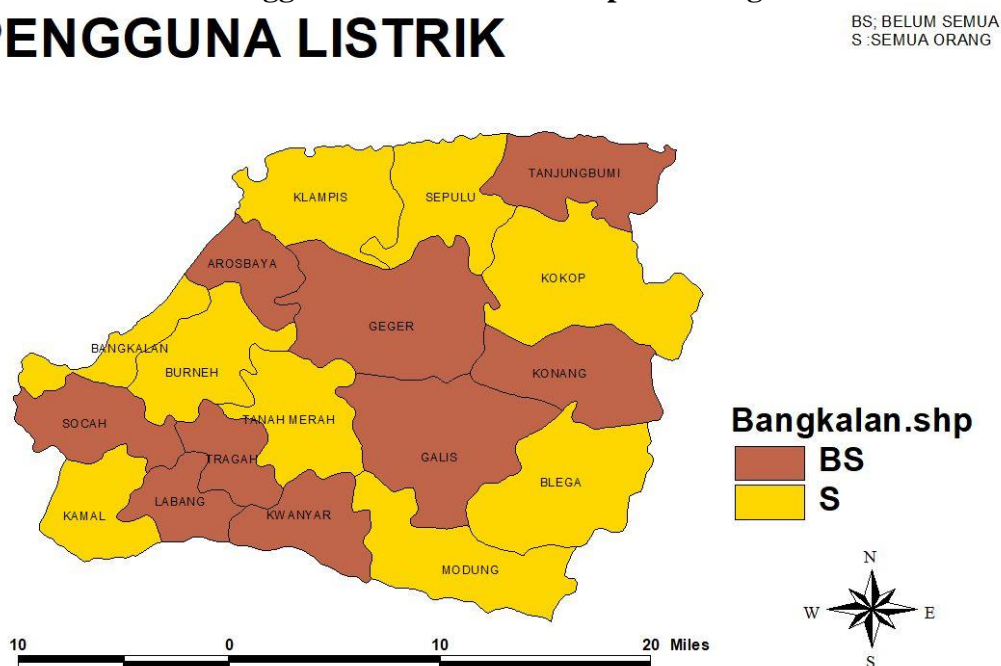
Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018 (diolah)

Indikator kualitas perumahan yang kedua adalah atap tempat tinggal. Mayoritas rumah tinggal di Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan atap yang layak yaitu genteng ialah 96,09 persen ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 95,70 persen. Indikator berikutnya ialah dinding rumah. Jenis rumah yang sudah menggunakan tembok sebagai dinding rumah adalah 72,64 persen.

4.23. Fasilitas Rumah Tinggal

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal, yang juga mendukung kualitas suatu rumah tinggal. Fasilitas penting agar rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali ialah tersedianya sarana penerangan listrik, air bersih, jamban sendiri dan dilengkapi dengan pembuangan tangki septik.

Gambar 18. Peta Penggunaan Listrik Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2017
PENGGUNA LISTRIK



Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018 (diolah)

Pada tahun 2016 tercatat 99,06 persen rumah tinggal di Kabupaten Bangkalan telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan dan di tahun

2017 menjadi 99,10 persen rumah yang menggunakan listrik. Angka penggunaan listrik ini menandakan bahwa penduduk bangkalan hampir seluruhnya menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan. Dari pemetaan diatas dapat diketahui daerah yang tidak seluruhnya menggunakan listrik 9 daerah yang berarti 0,9 persen penduduk yang tidak menggunakan listrik ada didaerah tersebut.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Pada tahun 2016 rumah tangga di Kabupaten Bangkalan yang menggunakan air leding dan air kemasan baru mencapai 25,18 persen, sumber air sebesar 45,38 persen berasal dari sumur terlindung. Sedangkan di tahun 2017 sumber air yang berasal dari air leding dan air kemasan menjadi 25,30, dan sumur terlindungi sebesar 51,36 persen. Sisanya sumber air didapat dari mata iar terlindungi pompa ataupun sumur yang tidak terlindungi.

Sistem pembuangan air kotor/air besar manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas tingkat resiko pencernaan yang mungkin ditimbulkan. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dan pembuangan akhir yang dilengkapi dengan tangki septik.

Dari tahun ke tahun rumah tangga yang memiliki jamban sendiri terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 rumah yang memiliki jamban sendiri dengan pembuangan akhir yang menggunakan tangki septik sebesar 36,40 persen menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 38,45 persen. Di tahun 2017 kepemilikan fasilitas buang air sendiri menjadi 63,60 persen dengan penggunaan tangka septik sebesar 36,26 persen.

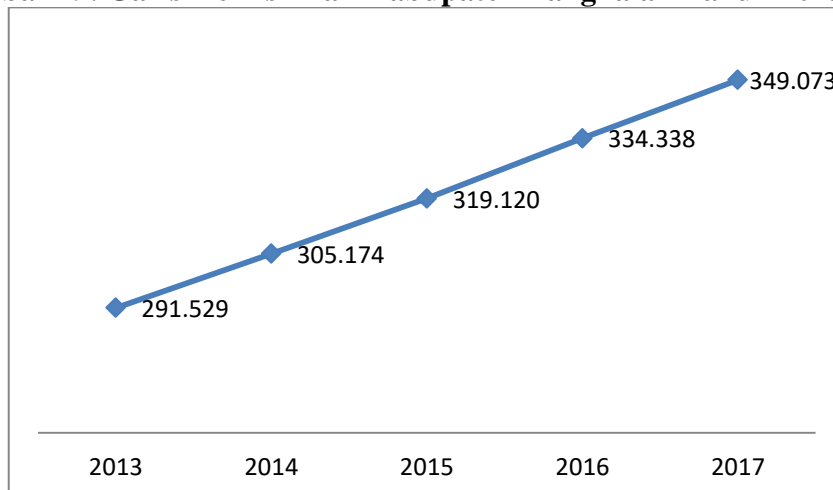
4.24. Perkembangan Penduduk Miskin

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk

hidup seara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2.100 kalori sehari, perumahan, pakaian, kesehatan dan pendidikan. Jumlah rupiah tersebut kemudian disebut sebagai **garis kemiskinan**.

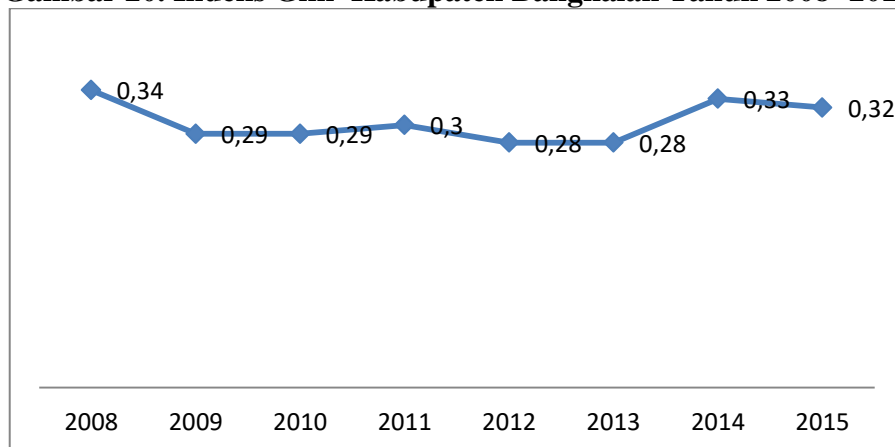
Kabupaten Bangkalan setiap tahunnya mengalami peningkatan garis kemiskinan, tahun 2017 Kabupaten Bangkalan memiliki garis kemiskinan sebesar 349.073 rupiah, nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 334.338 rupiah. Nilai ini hampir sama dengan nilai garis kemiskinan yaitu 342.092 rupiah dari Jawa Timur. Adapun nilai garis kemiskinan Kabupaten Bangkalan sebagai berikut.

Gambar 19. Garis Kemiskinan Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018 (diolah)

Ketimpangan pendapatan suatu wilayah akan diukur dengan Indeks Gini dari wilayah tersebut, nilai 0 pada indeks gini akan menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan telah terjadi. Kabupaten Bangkalan memiliki indeks gini yang fluktuatif dari tahun 2008 sampai dengan 2015 sebagai berikut :

Gambar 20. Indeks Gini Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 -2015

Sumber: Indikator Makro Ekonomi Sosial Jawa Timur, 2017 (diolah)

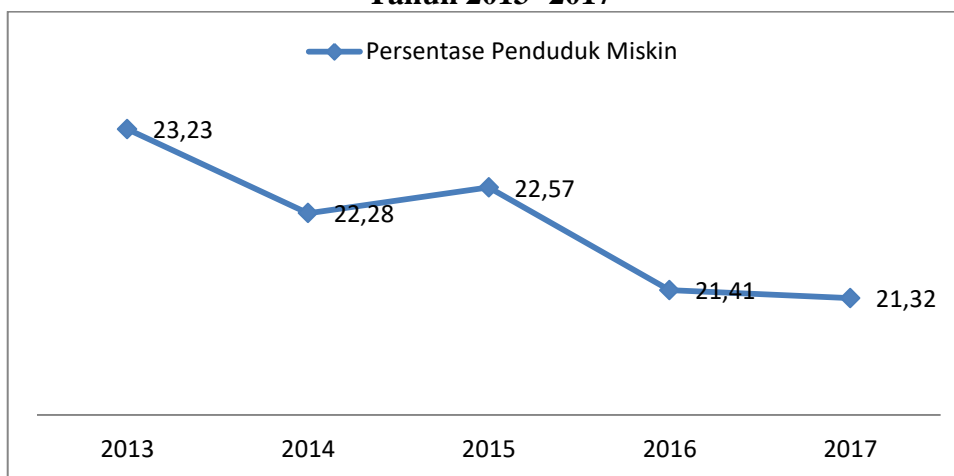
Indeks gini Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 lebih rendah apabila dibandingkan dengan indeks gini dari Jawa Timur yaitu 0.42 persen. Dalam analisis kemiskinan dikenal beberapa indikator penting yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Indikator yang paling sering digunakan adalah *head-count ratio* (Po). Ukuran ini memberikan gambaran tentang proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Indikator ini mudah dihitung dan mudah dipahami, namun demikian tidak dapat mengindikasikan seberapa parah/dalam tingkat kemiskinan yang terjadi, mengingat ukuran ini tetap tidak berubah jika seseorang yang miskin menjadi lebih miskin. Oleh Karena itu dikenal juga indikator kemiskinan yang lain yaitu tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index P1*) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index* atau *P2*).

Tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index P1*) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan dengan suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan diantara penduduk miskin, sehingga dibutuhkan indicator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index* atau *P2*). Penurunan pada *P1* mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antar standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata

pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya ketimpangan kemiskinan.

Di Kabupaten Bangkalan jumlah penduduk miskin meningkat dari tahun 2014 sebesar 212.160 menjadi 216.230 di tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016 menurun drastis menjadi 205.701 dari tahun 2015. Ditahun 2017 angka penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan meningkat menjadi 206.630. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan masih tergolong tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain. Hal ini sangat kontras dengan Kota Mojokerto yang memiliki jumlah penduduk 7.280 di tahun 2017. Dari data yang ada Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk miskin sekitar 4 juta lebih penduduk. Sedangkan dari jumlah persentase jumlah penduduk miskin dapat dilihat dari tahun 2013-2017 sebagai berikut :

Gambar 21. Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 -2017



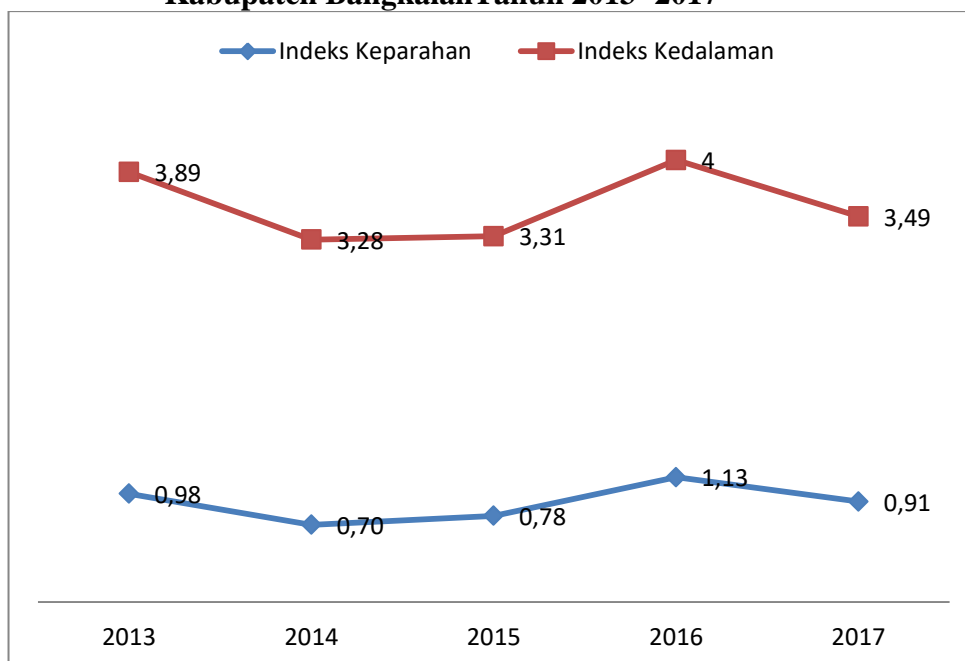
Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018 (diolah)

Hasil persentase menunjukkan daari tahun 2013-2017 mengalami fluktuatif, namun tahun terakhir persentase jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 21,32 persen. Angka penurunan yang ada di Kabupaten Bangkalan tidak sebanding dengan persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten lain. Kabupaten Bangkalan adalah Kabupaten yang menduduki persentase terbesar di Jawa Timur setelah Kabupaten Sampang, sedangkan

peringkat terendah di Jawa Timur adalah Kota Malang dengan persentase sebesar 4,17 persen.

Dilihat dari segi kedalaman dan keparahan kemiskinan (P1 dan P2) insiden kemiskinan pada tahun 2016 dapat disebutkan sebagai berikut. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mencapai 4,00 persen pada tahun 2016 meningkat dari tahun 2015 yang hanya berkisar 3,31 persen. Sedangkan indeks keparahan (P2) dari tahun 2015 mencapai 0,78 persen ditahun 2016 mencapai 1,13 persen. Ditahun 2017 indeks kedalaman kemiskinan menurun menjadi 3,49 persen, namun penurunan ini tetap menjadikan Kabupaten Bangkalan pada urutan tertinggi dari segi kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Jawa timur memiliki indeks kedalam kemiskinan hanya 1,87 persen. namun nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Malang yang memiliki indeks kedalam Kemiskinan hanya berkisar 0,56 persen.

Gambar 22. Indeks Kedalaman dan Keparahan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 -2017



Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018 (diolah)

Peliknya masalah kemiskinan mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah nyata dalam penanggulangan, sehingga dalam

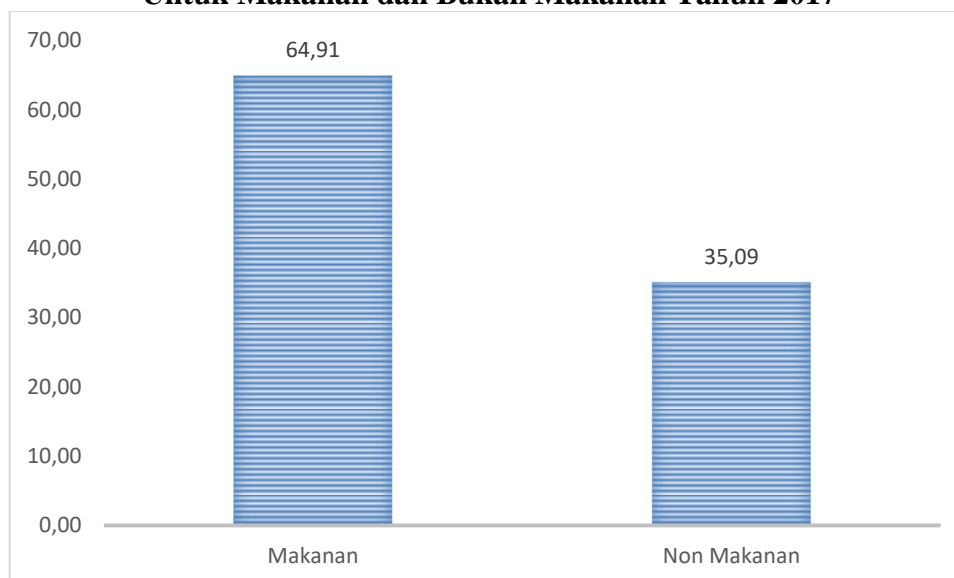
pelaksanaan pembangunan nasional, penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas yang utama. Dalam program MDG'S bahkan telah ditargetkan bahwa target persentase penduduk miskin diturunkan menjadi 7,5 persen. Untuk dapat memenuhi target tersebut maka pemerintah harus menggalakkan program penanggulangan kemiskinan untuk membantu penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Program utama yang dicanangkan untuk itu dapat meliputi penyediaan kebutuhan pokok utama keluarga miskin dan pengembangan budaya usaha masyarakat miskin. Namun mengingat kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi maka dalam menanggulangi kemiskinan dibutuhkan strategi penanggulangan yang komperensif yang meliputi kebijakan maksro dan lintas sektor.

4.25. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsinya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung.

Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi proporsi pengeluaran untuk kebutuhan non makanan semakin sejahtera penduduk wilayah tersebut. Dari gambar 23 dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 pengeluaran bukan makanan mencapai 35,09 persen. Terjadi penurunan di pengeluaran bukan makanan dari tahun sebelumnya sebesar 40,43 persen.

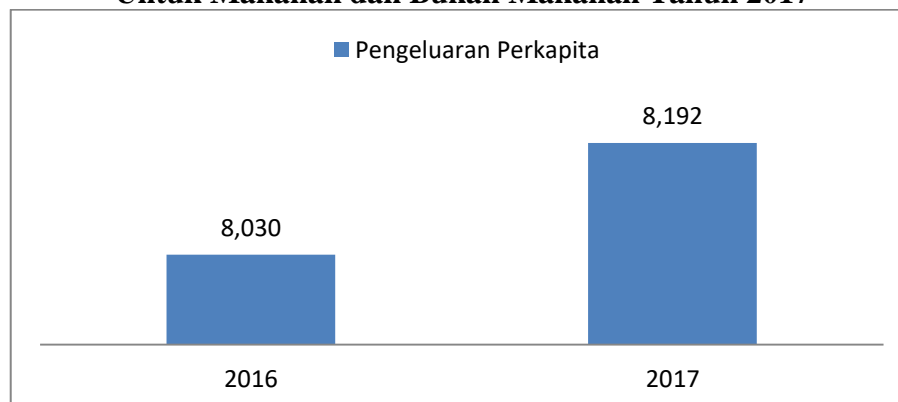
Gambar 23. Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita Untuk Makanan dan Bukan Makanan Tahun 2017



Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018 (diolah)

Pengeluaran perkapita Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu poin untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia diketahui dari tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan. Namun hal ini juga tidak sebanding apabila dibandingkan dengan Kabupaten lain yang ada di Jawa Timur, pengeluaran yang dihitung dengan nilai 8.192 dalam satuan rupiah ternyata posisi terendah di Jawa Timur pada Tahun 2017. Pengeluaran tertinggi adalah Kota Surabaya sebesar 16.726 rupiah.

Gambar 24. Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita Untuk Makanan dan Bukan Makanan Tahun 2017

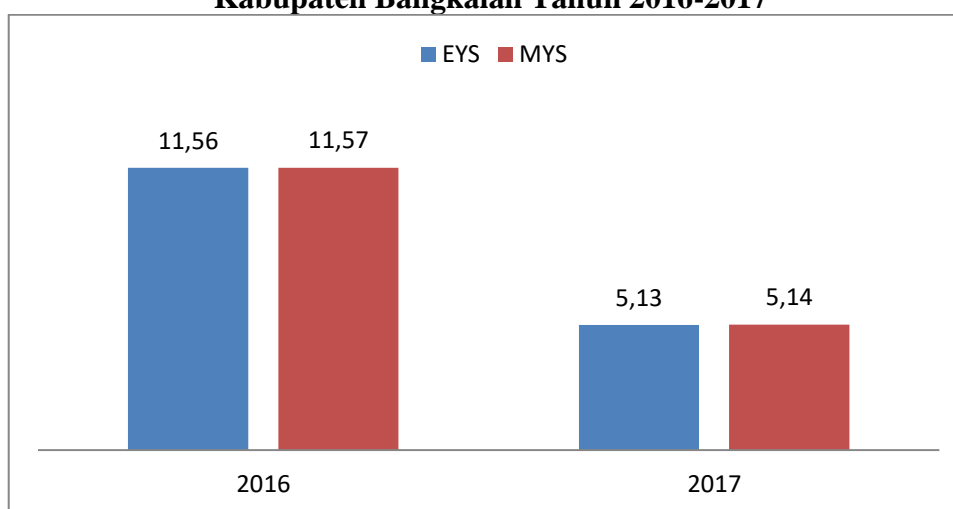


Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018 (diolah)

4.26. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Variabel dalam IPM adalah dengan menghitung 4 komponen yaitu besarnya angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah atau *mean years of schooling* (MYS), angka harapan lama sekolah atau *expected years of schooling* (EYS) dan juga pengeluaran perkapita. Adapun besar angka harapan hidup di Kabupaten Bangkalan tahun 2017 meningkat menjadi 69,82. Sedangkan untuk rata-rata lama sekolah dan juga angka harapan lama sekolah dari tahun 2016-2017 meningkatkan hanya satu point dari tahun sebelumnya.

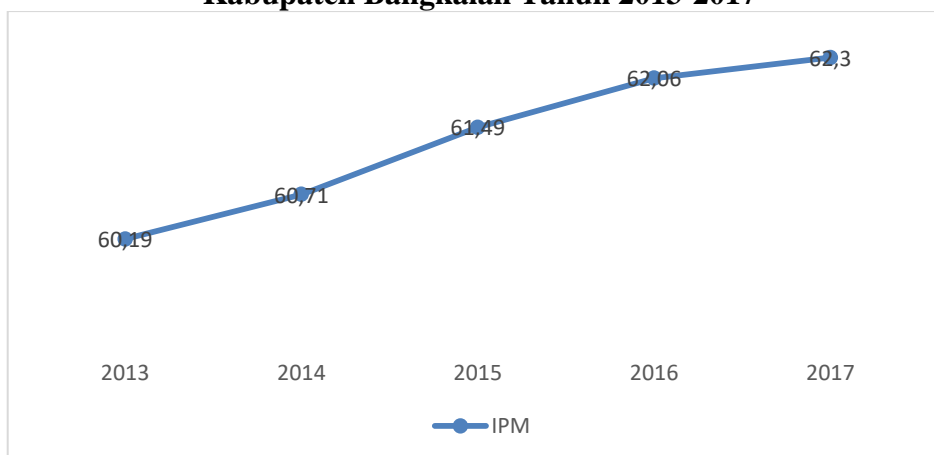
Gambar 25. Perkembangan Nilai Lama Pendidikan Kabupaten Bangkalan Tahun 2016-2017



Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018 (diolah)

Kabupaten Bangkalan berada pada posisi ke 37 dari kota/kabupaten di Jawa Timur dengan nilai 62,30 di tahun 2017, Untuk itu perlu ada peninjauan tentang kebijakan –kebijakan pemerintah terkait komponen-komponen dari IPM yang ada di Kabupaten Bangkalan. Komponen tersebut dapat ditingkatkan mulai dari segi kesehatan yang menyangkut dengan angka harapan hidup masyarakat, dari segi pendidikan terkait dengan angka harapan lama sekolah dan juga rata-rata lama sekolah, dari segi perekonomian masyarakat dengan melihat pendapatan perkapita dari masyarakat Kabupaten Bangkalan.

Gambar 26. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2017

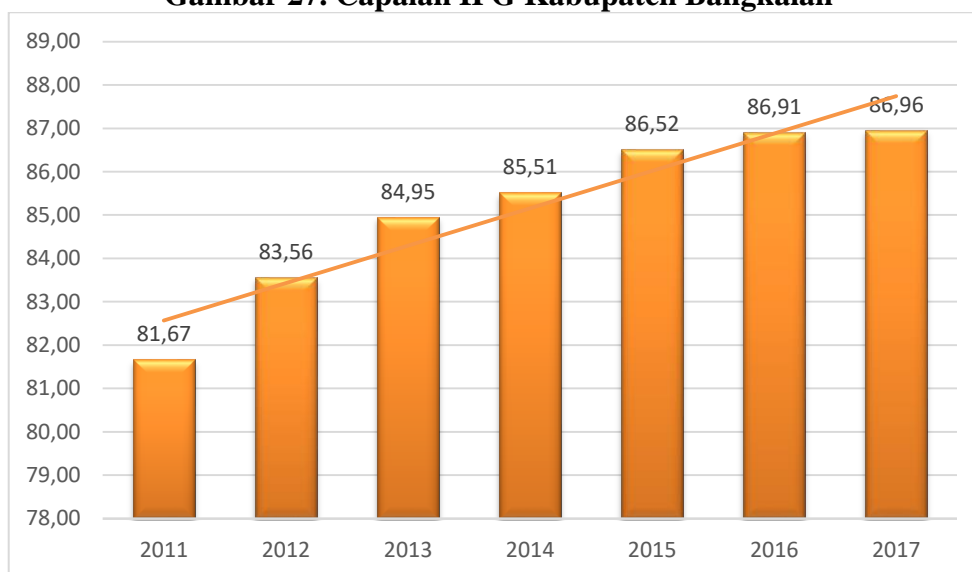


Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018 (diolah)

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun memang mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak mampu membuat peringkat Kabupaten Bangkalan menurut IPM di Provinsi Jawa Timur juga ikut meningkat. Terbukti di tahun 2017 Kabupaten Bangkalan juga masih berada pada urutan 37 dari 38 kota/kabupaten di Jawa Timur.

4.27. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

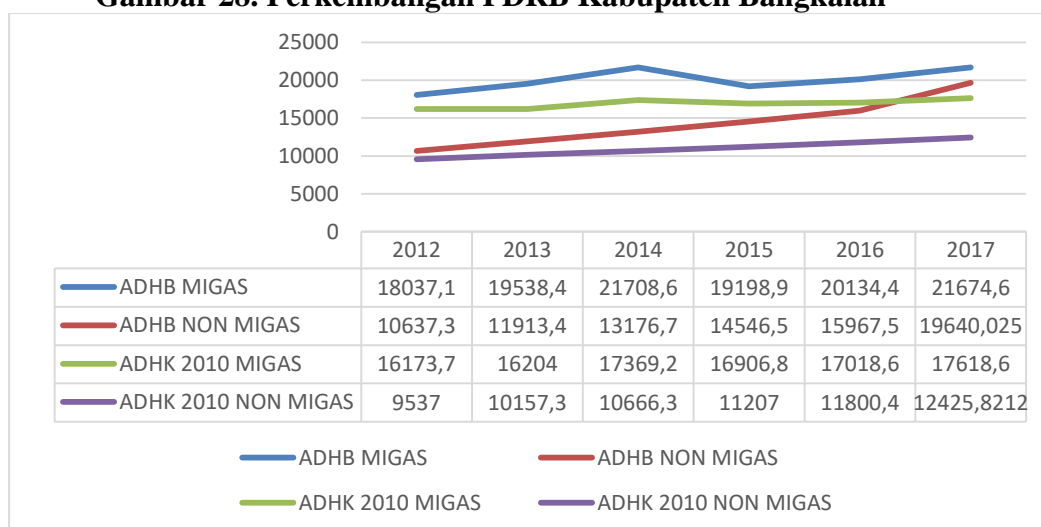
Pada perkembangannya dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Bangkalan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Perkembangan IPG selama 7 tahun terakhir mengalami trend positif, perkembangan IPG cenderung lebih pesat peningkatannya dibandingkan dengan perkembangan Indeks Pembangunan Laki-laki.

Gambar 27. Capaian IPG Kabupaten Bangkalan

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2018

Capaian IPG Kabupaten Bangkalan pada dasarnya membentuk trend yang positif dan mencapai angka yang cukup tinggi namun selisih kenaikan IPG yang terjadi di setiap tahun semakin menurun nilainya. Dapat diartikan bahwa kenaikan IPG semakin kecil pada tiap tahunnya. IPG Kabupaten Bangkalan dapat dinilai baik karena sudah mencapai angka 86,96.

4.28. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Gambar 28. Perkembangan PDRB Kabupaten Bangkalan

Sumber : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018

Tabel 5. Perkembangan PDRB Migas dan Non Migas Kabupaten Bangkalan Tahun 2012-2017

PDRB (MILIAR RUPIAH)				
Tahun	ADHB		ADHK 2010	
	MIGAS	NON MIGAS	MIGAS	NON MIGAS
2012	18037,1	10637,3	16173,7	9537
2013	19538,4	11913,4	16204	10157,3
2014	21708,6	13176,7	17369,2	10666,3
2015	19198,9	14546,5	16906,8	11207
2016	20134,4	15967,5	17018,6	11800,4
2017	21674,6	19640,03	17618,6	12425,82

Sumber : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018

Data di atas merupakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Migas dan Non Migas Kabupaten Bangkalan tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Data tersebut, berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK). Pada tahun 2014 merupakan tahun perolehan tertinggi PDRB (ADHB) dengan Migas Kabupaten Bangkalan, mencapai 21708,6 miliar rupiah. Sedangkan, perolehan PDRB terendahnya terdapat pada tahun 2012, hanya mencapai 18037,1 miliar rupiah. Rata-rata perolehan PDRB (ADHB) dengan Migas Kabupaten Bangkalan mencapai 19693,76 miliar rupiah. PDRB (ADHB) dari non Migas mengalami pertumbuhan yang cukup baik, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2017 mencapai 19640,03 miliar rupiah dan terendahnya pada tahun 2012 yang hanya mencapai 10637,3 miliar rupiah. Rata-rata perolehan PDRB (ADHB) dari non Migas yaitu 13248,28 miliar rupiah.

PDRB (ADHK 2010) kabupaten Bangkalan dari Migas selama kurun waktu 2012 sampai 2017 tertinggi terdapat pada tahun 2017, mencapai 17618,6 miliar rupiah dengan terendahnya pada tahun 2012 dengan jumlah 16173,7 miliar rupiah. Rata-rata PDRB (ADHK 2010) dengan Migas mencapai 1634,46 miliar rupiah. Sedangkan, PDRB (ADHK 2010) kabupaten Bangkalan dari Non Migas tertinggi tahun 2017 mencapai 12425,82 miliar rupiah dan terendah pada tahun 2012 mencapai 9837 miliar rupiah. Rata-rata perolehan PDRB (ADHK 2010) kabupaten Bangkalan dari Non Migas pertahunnya adalah 10965,6 miliar rupiah.

4.29. Distribusi Persentase PDRB

Tabel 6. Distribusi Persentase PDRB Sektoral Kabupaten Bangkalan

No	DISTRIBUSI PDRB PER SEKTOR-ADHB (%)						
	SEKTOR	TAHUN					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	19,9	20,58	20,32	25,51	26,14	25,18
2	Pertambangan dan penggalian	42,2	40,17	40,5	25,65	21,42	21,72
3	Industri pengolahan	1,93	1,99	1,99	2,47	2,53	2,55
4	Pengadaan listrik dan gas	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah	0,07	0,07	0,07	0,08	0,09	0,09
6	Konstruksi	8,78	9,34	9,83	12,12	13,78	13,93
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil	11	11,41	11,29	14,2	15,2	15,55
8	Transportasi dan pergudangan	1,04	1,06	1,05	1,33	1,39	1,43
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	0,78	0,8	0,82	1,06	1,15	1,19
10	Informasi dan komunikasi	3,4	2,54	3,41	4,2	4,44	4,51
11	Jasa keuangan dan asuransi	1,32	1,38	1,35	1,67	1,76	1,77
12	Real estate	0,87	0,87	0,84	1,06	1,1	1,1
13	Jasa perusahaan	0,19	0,19	0,19	0,24	0,25	0,25
14	Adm. Pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib	4,62	4,71	4,5	5,6	5,84	5,82
15	Jasa pendidikan	3	3,02	2,97	3,74	3,83	3,8
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,28	0,28	0,28	0,35	0,36	0,36
17	jasa lainnya	0,6	0,58	0,56	0,69	0,7	0,7

Sumber : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas terdapat perubahan persentase distribusi PDRB (ADHB) Kabupaten Bangkalan setiap tahunnya. Selama kurun waktu 2012 sampai dengan tahun 2015, penyumbang terbesar dalam PDRB adalah sektor pertambangan dan penggalian. Tetapi selama kurun waktu tersebut, sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan secara terus-menerus. Tahun 2017 sektor ini hanya menyumbang 21,72 persen dan berbanding jauh dengan tahun 2012 sebesar 42,2 persen. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang terbesar PDRB pada tahun 2016 sampai tahun 2017 sebesar 26,33 persen dan 25,18. Sektor yang paling sedikit menyumbangkan hasilnya dalam kurun waktu ini adalah sektor pengadaan listrik dan gas, dengan rata-rata setiap tahunnya sebesar 0,034 persen dari keseluruhan sektor yang ada. Sedangkan sektor yang mempunyai tren kenaikan adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, dan konstruksi.

4.30. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 7. Pertumbuhan PDRB Migas dan Non Migas Kabupaten Bangkalan

Tahun	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (%)		
	MIGAS	NON MIGAS	Total
2012	0,66	5,3	-1,42
2013	-2,66	5,07	0,19
2014	7,19	5,01	7,19
2015	0,19	6,5	-2,67
2016	-1,42	6,45	0,66
2017			3,53

Sumber : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan selama tahun 2012 sampai tahun 2017 terbagi menjadi dua, yaitu dengan migas dan non migas. Laju pertumbuhan ekonomi dengan migas tertinggi tahun 2014 sebesar 7,19 persen dan terendah pada tahun 2013 yaitu -2,66 persen yang menandakan terjadinya penurunan. Laju pertumbuhan ekonomi bangkalan rata-rata berkisar 1,25 persen dalam kurun waktu 2012 sampai 2017. Sedangkan, laju pertumbuhan ekonomi bangkalan yang tidak dipengaruhi oleh sektor migas dalam kurun waktu tahun 2012 sampai tahun 2017 tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 6,5 persen dan terendahnya hanya 5,01 persen pada 2014. Rata-rata pertahunnya 5,666 persen.

4.31. Indeks Implisit PDRB

Tabel 8. Indeks Implisit PDRB Kabupaten Bangkalan

Tahun	INDEKS IMPLISIT PDRB		
	MIGAS	NON MIGAS	Total
2012	117,43	135,31	111,52
2013	113,56	129,8	120,58
2014	124,98	123,54	124,98
2015	120,58	117,29	113,56
2016	111,51	111,54	118,31
2017			123,02

Sumber : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018

Indeks implisit PDRB Kabupaten Bangkalan kurun waktu 2012 sampai 2017, dengan migas tertinggi ada pada tahun 2014 sebesar 124,98 dan terendah pada tahun 2012 yaitu 111,51 dengan rata-rata pertahunnya itu 117,612.

Sedangkan, dengan indeks implisit PDRB non migas tertingginya 135,31 pada tahun 2016 dan terendah tahun 111,54 dengan rata-rata 123,496.

4.32. Laju Implisit PDRB (Inflasi)

Tabel 9. Laju Implisit PDRB (Inflasi)

Laju Implisit PDRB (%)		
Tahun	Migas	Non Migas
2012	3,29	5,98
2013	8,12	5,16
2014	3,65	5,32
2015	-9,14	5,07
2016	3,41	4,25
2017	3,98	

Sumber : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018

Laju implisit tertinggi PDRB Kabupaten Bangkalan dari sektor dengan migas yaitu 8,12 persen pada tahun 2013 dan terendah pada tahun 2015 yang turun menjadi -9,14 persen. Rata-rata laju implisit PDRB dengan migas 1,866 persen. Sedangkan, laju implisit PDRB Kabupaten Bangkalan non migas tertinggi tahun 2012 sebesar 5,98 persen dan terendah pada tahun 2016 sebesar 4,25 persen. Untuk rata-rata laju implisit PDRB non migas yaitu 5,156 persen.

4.33. Indeks Gini

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

Tabel 10. Indeks Gini Kabupaten Bangkalan

Tahun	Indek Gini
2008	0.34
2009	0.29
2010	0.29
2011	0.3
2012	0.28
2013	0.28
2014	0.33
2015	0.32

Sumber : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018

Keterangan:	G = 0	= Merata Sempurna
	G < 0,3	= Ketimpangan Rendah
	0,3 ≤ G ≤ 0,5	= Ketimpangan Sedang
	G > 0,5	= Ketimpangan Tinggi
	G = 1	= Tidak Merata Sempurna

Bila mengacu pada tabel diatas maka pada tahun 2008 Kabupaten Bangkalan yang memiliki indeks gini 0.34 memiliki tingkat ketimpangan sedang, sedangkan ditahun 2009 sampai 2013 bangkalan mmeiliki indeks gini dibawah 0.3 yang artinya memiliki ketimpangan rendah pada tahun itu. Akan tetapi ditahun 2014 sampai dengan 2015 indeks gininya naik hingga mencapai 0.32 yang mengindikasikan Kabupaten Bangkalan ditahun tersebut kembali memiliki tingkat ketimpangan sedang.

Ketika ketimpangan semakin meluas di kabupaten bangkalan akan berdampak adanya tingginya tingkat kesenjangan yang ada di bangkalan. Ketimpangan ini dalam praktiknya sering memicu kecemburuan sosial dan kekerasan yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang pada ujungnya masyarakat akan rentan terhadap konflik. Konflik juga mempengaruhi perekonomian bila mengganggu distribusi barang dan jasa, menghentikan jalannya produksi, hingga penurunan dan penundaan investasi saat ini. Selain itu, ketimpangan yang tidak segera diatasi dapat menumbuhkan kelompok miskin kronis sehingga malah memperlebar ketimpangan dan melemahkan pertumbuhan ekonomi.

Jika dibandingkan dengan kabupaten sumenep, Indeks gini di daerah bangkalan lebih besar, hal ini dapat dilihat pada tahun 2008 indesks gini pada

kabupaten sumenep mencapai 0.24 nilai ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan indeks gini di kabupaten Bangkalan yaitu sebesar 0.34, perbedaan ini disebabkan karena laju pertumbuhan penduduk di kabupaten bangkalan dan sumenep juga berbeda, begitu pula pada tingkat pendidikan dan pengangguran di kedua kabupaten juga berbeda.

4.34. Indeks Disparitas

Tabel 11. Indeks Disparitas Kabupaten Bangkalan Tahun 2010-2016

Tahun	Nilai Indeks Williamson
2010	0.244601204
2011	0.246209918
2012	0.228805476
2013	0.25870738
2014	0.273775939
2015	0.228721219
2016	0.217629934

Sumber : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018 (diolah)

Salah satu ukuran ketimpangan lainnya selain Indeks Gini adalah Indeks Williamson. Jika Indeks Gini bisa digunakan untuk melihat ketimpangan antar kelompok pendapatan dalam suatu wilayah maka Indeks Williamson menggambarkan ketimpangan pendapatan antar wilayah. Williamson mengamati tingkat kesenjangan di berbagai negara yang mempunyai tingkat perkembangan yang berbeda. Williamson menilai tingkat kesenjangan dengan memperkenalkan Indeks Williamson. Indeks Williamson adalah suatu indeks yang didasarkan pada ukuran penyimpangan pendapatan perkapita penduduk tiap wilayah dan pendapatan perkapita nasional. Jadi, indeks williamson ini merupakan suatu modifikasi dari standar deviasi. Dengan demikian makin tinggi Indeks Williamson berarti kesenjangan wilayah semakin besar dan begitupun sebaliknya semakin rendah Indeks Williamson maka akan semakin rendah kesenjangan di wilayah tersebut.

Beberapa peneliti menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah ketimpangan dalam masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang, atau tinggi. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut; ketimpangan taraf rendah bila indeks Williamson $< 0,35$, ketimpangan taraf sedang bila indeks Williamson antara $0,35-0,50$ dan ketimpangan taraf tinggi bila

indeks Williamson $>0,5$. Empat Kabupaten di Pulau Madura memiliki tingkat ketimpangan yang relative rendah yaitu di bawah 0.35 selama tujuh tahun terakhir dan mengalami penurunan sampai tahun 2016 yang hanya sebesar 0.21.

4.35. Kinerja Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah. Perdagangan juga merupakan salah satu upaya pemenuhan volume permintaan yang dikehendaki pasar. Adanya perdagangan dapat meningkatkan produktivitas serta akhirnya berdampak pada dibutuhkannya lebih banyak tenaga kerja, baik dari segi produsen maupun distributor. Setiap daerah memiliki kekayaan dan sumber daya yang berbeda, dengan adanya perdagangan maka setiap orang dapat menikmati barang/produk yang tidak dapat dihasilkan sendiri di wilayahnya.

Data di tabel merupakan perdagangan Kabupaten Bangkalan yang meliputi jumlah pasar dan jumlah pedagang pasar tahun 2006 sampai dengan 2018. Tahun 2015 merupakan tahun tertinggi jumlah pedagang pasar yaitu mencapai 153,702 orang. Sedangkan tahun 2016 merupakan tahun terendah jumlah pedagang pasar yang hanyasebesar 143,518 orang. Penurunan jumlah pedagang pasar tersebut disebabkan

Pada tahun 2006 sampai dengan 2011 jumlah pasar di Kabupaten Bangkalan yaitu sebanyak 28 pasar. Sedangkan tahun 2012 sampai dengan 2018 sebanyak 29 pasar. Peningkatan jumlah pasar dan jumlah pedagan gini akibat dari kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi. Pasar merupakan wadah untuk segala aktivitas ekonomi masyarakat, oleh karena itu pasar menjadi penggerak ekonomi rakyat.

Tabel 12. Jumlah Pasar dan Jumlah Pedagang di Pasar

Tahun	Jumlah Pasar
2013	81
2014	87
2015	88
2016	94

Sumber : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018

Perdagangan memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Bangkalan karena perdagangan merupakan salah satu sector penyumbang terbesar

dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bangkalan, oleh karena itu sector perdagangan lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan. Hal ini berbeda dengan Kabupaten Sumenep dimana sector perdagangan memiliki kontribusi yang tidak terlalu besar dalam Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Sumenep karena kontribusi terbesarnya adalah dari sector keuangan.

4.36. Kinerja Investasi

Tabel 13. Investasi Bulanan Kabupaten Bangkalan

Periode		Nilai Investasi	Keterangan TK. (ORG)
Tahun 2016	Januari	Rp. 15.756.000.000,-	317
	February	Rp. 13.407.425.181,-	356
	Maret	Rp. 17.690.840.000,-	645
	April	Rp. 5.036.431.000,-	143
	Mei	Rp. 12.182.000.000,-	262
	Juni	Rp. 17.012.000.000,-	213
	Juli	Rp. 18.560.000.000,-	99
	Agustus	Rp. 8.845.000.000,-	209
	September	Rp. 9.935.000.000,-	164
	Oktober	Rp. 46.265.350.000,-	244
	November	Rp. 4.040.000.000,-	125
	Desember	Rp. 8.485.000.000,-	211
Total		Rp.177.215.046.181,-	2.988
Tahun 2017	Januari	Rp. 2.390.000.000,-	25
	Februari	Rp. 13.539.362.324,-	238
	Maret	Rp. 11.904.610.000,-	205
	April	Rp. 8.629.416.000,-	109
	Mei	Rp. 27.126.508.000,-	306
	Juni	Rp. 5.675.390.000,-	95
	Juli	Rp. 9.782.830.000,-	171
	Agustus	Rp. 9.775.210.000,-	158
	September	Rp. 7.110.240.000,-	111
	Oktober	Rp. 3.545.090.000,-	64
	November	Rp. 9.060.450.000,-	105
	Desember	Rp. 179.265.360.000,-	323
Total		Rp. 287.804.466.324,-	1.910
Tahun 2018	Januari	Rp. 8.060.180.000,-	171
	Februari	Rp. 29.855.150.000,-	185
	Maret	Rp. 30.225.090.000,-	125
	April	Rp. 48.670.090.000,-	249
	Mei	Rp. 13.725.270.000,-	136
	Juni	Rp. 13.965.000.000,-	66
	Juli	Rp. 15.214.877.000,-	190
Total		Rp. 260.036.335.000,-	1.122

Sumber: Dinas Perijinan, Penanaman Modal Kabupaten Bangkalan 2018

Data di atas merupakan investasi tahun 2016 sampai dengan 2018 di Kabupaten Bangkalan. Investasi adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi yang berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan, investasi disebut juga dengan penanaman modal. Penanaman modal memberikan peranan dalam pembangunan ekonomi di suatu daerah. Menurut Sadono Sukirno investasi adalah sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam suatu modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan juga jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Tahun 2017 merupakan tahun tertinggi investasi Kabupaten Bangkalan, mencapai 287.804.466.324 miliar rupiah dengan terendahnya tahun 2016 yang hanya mencapai 177.215.046.181 miliar rupiah. Tahun 2016 investasi tertinggi pada bulan Oktober yaitu sebesar 46.265.350.000 miliar rupiah dan terendah pada bulan November yaitu yang hanya mencapai 4.040.000.000 miliar rupiah. Tahun 2017 investasi tertinggi pada bulan desember mencapai 179.265.360.000 miliar rupiah dan terendah pada bulan januari yang hanya mencapai 2.390.000.000 miliar rupiah. Pada tahun 2018 periode januari sampai dengan juli, total investasi sebesar 260.036.335.000 miliar rupiah tertinggi pada bulan april yaitu mencapai 48.670.090.000 miliar rupiah dan terendah pada bulan januari yang hanya mencapai 8.060.180.000 miliar rupiah. Sementara itu, untuk penyerapan total tenaga kerja terbesar terjadi di tahun 2016 yaitu sebanyak 2.988 orang, dan terenda terjadi di tahun 2018 per periode juli 2018 yantu hanya 1122 orang.

Adanya peningkatan investasi yang terjadi di Kabupaten Bangkalan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendorong kemajuan produsen di daerah Bangkalan, terjadinya alih teknologi, pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga mengurangi pengangguran dan peningkatan pendapatan daerah. Faktor-faktor penentu investasi sangat tergantung pada situasi di masa depan yang sulit untuk diramalkan, maka investasi merupakan komponen yang paling mudah

berubah. Adanya pengaruh nilai tukar, tingkat suku bunga, tingkat inflasi dan infrastruktur merupakan faktor yang dapat mempengaruhi investasi.

Peningkatan investasi tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 disebabkan menurunnya tingkat suku bunga. Menurut teori klasik semakin rendah tingkat suku bunga, maka keinginan masyarakat untuk melakukan investasi menjadi semakin besar, begitupun sebaliknya semakin tinggi tingkat suku bunga maka keinginan masyarakat untuk melakukan investasi menjadi semakin kecil. Pada tahun 2016 tingkat suku bunga sebesar 4,75% sedangkan tahun 2017 tingkat suku bunga sebesar 4,25%. Sehingga menyebabkan adanya peningkatan investasi di Kabupaten Bangkalan.

Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan kabupaten Sumenep yang memiliki tingkat investasi lebih besar dari pada Kabupaten Bangkalan yaitu mencapai 1,7 triliun pada tahun 2017. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan aspek dari kedua kabupaten tersebut seperti infrastruktur salah satunya adalah pembangunan bandara Trunojoyo di Kabupaten Sumenep, sistem pemerintahan, aspek geografis serta kondisi makro ekonomi yang terjadi di kedua kabupaten tersebut.

4.37. Nilai Tukar Petani (NTP)

Tabel 14. Nilai Tukar Petani Kabupaten Bangkalan Tahun 2017

Bulan	NTP
Januari	112.40
Februari	112.60
Maret	108.57
April	106
Mei	108.37
Juni	109.94
Juli	106.81
Agustus	104.27
September	106.11
Oktober	104.44
November	99.99
Desember	104.71

Sumber : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018

**Tabel 15. Komponen NTP Kabupaten Bangkalan
Bulan Januari-Juni 2017**

Nilai Tukar	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Tanaman Pangan	112,40	112,60	108,57	106,00	108,37	109,94
Hortikultura	108,38	99,99	111,20	99,32	99,58	100,64
Perkebunan Rakyat	112,43	111,84	115,64	115,19	115,65	123,37
Peternakan	118,99	119,29	112,14	105,05	112,37	107,16
Perikanan	109,57	109,25	108,94	111,24	112,84	120,99
Bangkalan (Gabungan)	113,61	112,51	110,09	104,92	108,33	108,09

Sumber : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018

**Tabel 16. Komponen NTP Kabupaten Bangkalan
Bulan Juli-Desember 2017**

Nilai Tukar	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Tanaman Pangan	106,81	104,27	106,11	104,44	99,99	104,71
Hortikultura	108,54	107,97	105,56	111,62	129,22	114,59
Perkebunan Rakyat	115,12	126,50	120,68	117,21	115,24	116,51
Peternakan	104,27	110,28	128,35	117,09	107,57	110,05
Perikanan	119,13	125,55	129,52	114,43	109,66	114,31
Bangkalan (Gabungan)	106,64	107,13	112,80	109,38	106,92	108,01

Sumber : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018

Nilai Tukar Petani (NTP) Bangkalan (gabungan) seperti terlihat pada Tabel diatas merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh Indeks pendukungnya, yaitu NTP Subsektor Tanaman Pangan, subsektor Hortikultura, subsektor Perkebunan, subsektor Peternakan dan subsektor Perikanan. Masing-masing subsektor mempunyai besar peranan yang berbeda, makin besar peranan subsektor makin besar pengaruhnya terhadap perubahan besaran Indeks gabungan tersebut. Tanaman perkebunan rakyat merupakan subsektor yang mempunyai peranan paling besar diantara subsektor yang lain, mempunyai rata-rata indeks 117,12 persen. Tetapi bila dilihat tren yang terjadi nampak bahwa subsektor ini cenderung fluktuatif dan terjadi kenaikan pada akhir tahun, yakni indeks di bulan Desember menjadi 116,51. Selama periode bulan Januari sampai bulan Desember terjadi kenaikan sebesar 3,63 persen.

Rata-rata indeks subsektor perikanan 115,45 persen, merupakan terbesar kedua peranannya setelah subsektor tanaman perkebunan rakyat. Selama periode

bulan Januari sampai dengan bulan Desember pada subsektor ini terjadi kenaikan yaitu sebesar 4,33 persen. Pada bulan Januari 109,57 persen menjadi 114,31 persen pada bulan Desember. Kenaikan terbesar terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar 7,22 persen.

Selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember subsektor peternakan sangat fluktuatif, terus mengalami kenaikan dan penurunan dari 118,99 menjadi 110,05. Bulan September merupakan puncak kenaikan indeks yaitu sebesar 16,39 persen. Sedangkan kenaikan dan penurunan di bulan-bulan lainnya berkisar 0,26 persen sampai 10,70 persen. Meskipun demikian selama periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember subsektor peternakan mengalami penurunan sebesar 7,51 persen dan mempunyai rata-rata indeks 112,68 merupakan urutan ketiga setelah subsektor perikanan.

Berbeda dengan subsektor peternakan, pada subsektor hortikultura yang merupakan urutan keempat, terjadi kenaikan indeks, meskipun tidak terlalu besar, yaitu 5,73 persen selama periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kenaikan tertinggi terjadi pada bulan November yaitu sebesar 15,77 persen. Perubahan indeks dari bulan ke bulan sangat fluktuatif, meskipun trend yang terjadi cenderung naik tetapi kumulatif kenaikannya relatif tidak besar. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan indeks diterima relatif lebih besar dibanding kenaikan indeks dibayar pada subsektor hortikultura. Artinya harga produk-produk hortikultura yang meliputi sayur-sayuran dan buah-buahan relatif naik sampai akhir tahun. Rata-rata indeks subsektor hortikultura adalah 108,25 selisih 4,09 persen dibawah subsektor peternakan.

Rata-rata indeks subsektor tanaman pangan 106,93 persen, merupakan terbesar kelima peranannya setelah subsektor hortikultura. Selama periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember pada subsektor ini terjadi penurunan yaitu sebesar 6,84 persen. Pada bulan Januari 112,60 persen menjadi 104,71 persen pada bulan Desember. Penurunan terbesar terjadi pada bulan November yaitu sebesar 4,26 persen.

Rata-rata indeks Nilai Tukar Petani Kabupaten Bangkalan secara umum (gabungan) selama periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember adalah

109,04. Secara teori dengan besaran indeks diatas seratus persen, mengindikasikan tingkat kesejahteraan petani di Kabupaten Bangkalan lebih baik dibanding tahun dasar (tahun 2012). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar produk pertanian terhadap barang konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi tahun 2017 secara umum masih lebih tinggi dibanding kondisi tahun 2012.

4.38. Koperasi

Koperasi didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992). Sedangkan, menurut organisasi internasional tentang perkoperasian yaitu ICA (*International Cooperative Alliance*) mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan otonom orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan aspirasi ekkonmi, sosial, budaya secara bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan bersama secara demokratis.

Koperasi keberadaannya dianggap sebagai sokoguru perekonomian Indonesia, oleh karena itu tak hayal jika koperasi ada dan berjalan di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Salah satu daerah yang memiliki koperasi yaitu Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya berada di Pulau Madura. Seperti halnya wilayah Indonesia yang dianggap sebagai negara agraris, Kabupaten Bangkalan pun sama halnya. Mata percaharian utama masyarakatnya yaitu sebagai petani. Oleh karena itu koperasi yang berdiri dan berjalan di Kabupaten Bangkalan didominasi oleh Koperasi Tani. Selain itu koperasi-koperasi primer yang merupakan koperasi yang terdiri dari paling sedikit 20 anggota banyak tersebar di Kabupaten Bangkalan. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Bangkalan.

Tabel 17. Jenis dan Jumlah Koperasi di Kabupaten Bangkalan

Jenis dan Jumlah Koperasi		
Tahun	Jumlah Koperasi Tani	Jumlah Koperasi Primer
2012	69	777
2013	69	781
2014	69	784
2015	69	787
2016	69	796
2017	69	799
2018	69	799

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2018

Dari data diatas diketahui bahwa terdapat koperasi tani dan koperasi primer yang ada di Kabupaten Bangkalan. Antara tahun 2012 hingga tahun 2018 terlihat bahwa jumlah koperasi tani di Kabupaten Bangkalan tidak mengalami peningkatan dan penurunan. Jumlah keseluruhan koperasi tani di Kabupaten Bangkalan yaitu sebanyak 69 Koperasi. sedangkan, koperasi primer di Kabupaten Bangkalan cukup mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Mulai dari tahun 2012 jumlah koperasi primer yaitu sebanyak 777 koperasi namun sebanyak 114 koperasi tidak menjalankan aktivitasnya. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya terjadi peningkatan jumlah koperasi primer. Hingga tahun 2018 jumlah koperasi primer di Kabupaten Bangkalan adalah sebanyak 799 koperasi.

Koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Bangkalan tersebar di seluruh kabupaten yang ada di wilayah kabupaten, yaitu sebanyak 17 kecamatan. Berikut adalah data koperasi tani dan koperasi primet per kecamatan di Kabupaten Bangkalan tahun 2017-2018. Koperasi tani paling banyak pada tahun 2017 terdapat di kecamatan Kwanyar Modung, yaitu sekitar 9-12 koperasi. Kecamatan yang paling sedikit memiliki koperasi tani tahun 2017 adalah di Kecamatan Kamal. Sedangkan pada tahun yang sama yaitu 2017, kecamatan dengan koperasi primer paling banyak terdapat di Kecamatan Bangkalan yaitu sebanyak 190 koperasi. Untuk kecamatan yang memiliki koperasi primer paling sedikit yaitu kecamatan Konang. Tahun 2018 jumlah koperasi tani maupun koperasi primer per

kecamatan di Kabupaten Bangkalan tidak mengalami perubahan. Tetap Kecamatan Kwanyar Modung yang memiliki koperasi tani terbanyak dan Kecamatan Kamal paling sedikit memiliki koperasi tani. Begitupula halnya dengan koperasi primer, kecamatan Bangkalan memiliki jumlah koperasi paling banyak di Kabupaten Bangkalan.

Koperasi kurang mengalami perkembangan yang pesat hal ini dikarenakan oleh beberapa hal diantaranya yaitu: struktur organisasi Indonesia mirip organisasi pemerintah/lembaga kemasyarakatan yang terstruktur dari primer hingga tingkat nasional. Hal ini telah menunjukkan kurang efektifnya peran organisasi sekunder dalam membantu koperasi primer. Tidak jarang menjadi instrumen eksploitasi sumberdaya dari daerah pengumpulan Tantangan untuk pengembangan masa depan memang relatif berat, karena jika tidak dilakukan pemberdayaan dalam koperasi dapat tergusur dalam percaturan persaingan yang makin lama makin intens dan mengglobal. Jika dilihat dari ciri-ciri globalisasi yang memiliki ciri-ciri dimana pergerakan barang, modal dan uang yang sedemikian bebas dan perlakuan terhadap pelaku ekonomi sendiri dan asing sama, maka tidak ada alasan bagi suatu negara untuk menidurkan para pelaku ekonomi termasuk koperasi yang tidak efisien dan kompetitif.

Tabel 18. Jumlah Koperasi Per Kecamatan Tahun 2017-2018

Kecamatan	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Koperasi Tani	Koperasi Primer	Koperasi Tani	Koperasi Primer
Kamal	1	44	1	44
Labang	4	25	4	25
Kwanyar Modung	9-12	34-48	9-12	34-48
Blega	5	44	5	44
Konang	3	22	3	22
Galis	3	34	3	34
Tanah Merah	7	42	7	42
Tragah	5	30	5	30
Socah	5	30	5	30
Bangkalan	8	190	8	190
Burneh	2	49	2	49
Arosbaya	6	38	6	38
Geger	2	29	2	29
Kokop	4	31	4	31
Tanjung Bumi	6	40	6	40
Sepulu	6	33	6	33
Klampis	6	36	6	36

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2018

Permasalahan yang ada dalam koperasi lainnya yaitu berupa dana yang bukan berasal dari internal koperasi melainkan berasal dari dana luar. Hal ini tidak baik untuk perkembangan koperasi karena dengan adanya dana dari luar maka koperasi harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak luar koperasi tersebut yang bisa saja malah mengurangi ke-efektifan dan pengembangan koperasi sesuai dengan tujuan awal pendirian koperasi. Kebanyakan koperasi didirikan hanya karena ingin memperoleh dana dari luar saja bukan karena ingin mengembangkan potensi yang ada, serta keanggotaannya yang seharusnya bersifat sukarela menjadi sedikit ada pemaksaan. Oleh karena itu pendirian koperasi tidak memberikan manfaat apapun kepada masyarakat (koperasi tidak berjalan dengan aktif dan semestinya).

Permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu permasalahan internal dan permasalahan eksternal. Permasalahan internal koperasi terkait dengan 1) banyaknya pengurus koperasi yang sudah berusia lanjut sehingga kapasitasnya terbatas, 2) pengurus koperasi biasanya juga merupakan tokoh dalam masyarakat sehingga “rangkap jabatan” dan hal ini menimbulkan fokus perhatiannya terhadap pengelolaan koperasi berkurang, 3) ketidakpercayaan anggota koperasi menimbulkan kesulitan dalam pemulihannya, 4) karena terbatasnya dana yang dimiliki maka tidak ada pemeliharaan fasilitas (mesin-mesin) sedangkan teknologi terus berkembang dengan pesat, hal ini akan berdampak pada harga pokok yang relatif tinggi sehingga mengurangi kekuatan bersaing oleh koperasi, 5) banyak anggota yang kurang memiliki solidaritas terhadap koperasi namun di sisi lain banyak anggota yang berhutang kepada koperasi, 6) administrasi kegiatan-kegiatan belum memenuhi standar tertentu sehingga penyediaan data untuk pengambilan keputusan kurang lengkap, 7) modal usaha yang relatif kecil menjadikan volume usaha koperasi terbatas, namun apabila ingin memperbesar volume kegiatan, ketrampilan yang dimiliki tidak mampu menanggulangi usaha yang besar, selain itu karena insentif yang rendah juga menjadikan banyak orang tidak tergerak hatinya untuk menjalankan usaha besar yang kompleks.

Permasalahan eksternal yang dihadapi oleh koperasi yaitu 1) semakin bertambahnya persaingan badan usaha yang lain secara bebas memasuki bidang usaha yang sedang dijalankan oleh koperasi, 2) dicabutnya fasilitas-fasilitas tertentu yang menjadikan koperasi tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik, 3) kurangnya kepercayaan masyarakat kepada koperasi karena kegagalan koperasi di masa lalu yang tanpa memberikan pertanggungjawaban (kompensasi) kepada masyarakat, 4) tingkat harga yang selalu berubah (naik) menyebabkan pendapatan penjualan sekarang tidak dapat dimanfaatkan untuk meneruskan usaha justru malah menciutkan usaha (Saraswati, 2014).

4.39. Pertanian

Kondisi fisik dan geografis Kabupaten Bangkalan merupakan daerah yang relatif kurang subur yang berupa pantai, dataran rendah dan pegunungan. Gambaran sumberdaya alam seperti iklim, fisiografi maupun lahan sangat mempengaruhi pengembangan komoditas tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Bangkalan. Iklim sangat penting dalam penentuan jenis tanaman yang akan ditanam karena menyangkut kesesuaian habitat dari tanaman tersebut. Adanya perubahan iklim mempengaruhi pola tanam tanaman pertanian.

Beberapa komoditi hasil pangan yang ada di kabupaten Bangkalan antara lain padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Berikut ini data hasil produksi hasil pangan Kabupaten Bangkalan 2012 hingga 2017.

Tabel 19. Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Bangkalan Tahun 2012-2017 (Ton)

Komoditas	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Padi	2.596.409,01	2.951.780,00	3.120.865,49	3.131.586,79	3.168.611	3.274.627
Jagung	140.490,80	1.275.270,39	1.367.121,73	1.328.842,02	1.423.297,19	1.525.958
Kedelai	51.210,84	110.579,92	135.470,52	138.680,85	140.518,52	85.064
Kacang Tanah	345.047,47	355.023,57	315.835,56	337.515,91	360.674,35	234.069
Kacang Hijau	20.058,31	23.380,63	15.746,12	13.564,71	21.450,72	18.600
Ubi Kayu	719.756,85	638.641,02	499.780,42	492.830,13	501.357,64	443.267
Ubi Jalar	134.260,78	130.650,09	173.910,08	199.879,16	142.704,25	171.479

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 2018

Berdasarkan pada tabel 19. Dapat dilihat bahwa produksi komoditi hasil pangan Kabupaten bangkalan terbesar ialah pada komoditi padi yakni dengan total produksi mencapai 18.243.878,84 ton dari tahun 2012 hingga 2017, sedangkan komoditi dengan total produksi terendah terjadi pada komoditi kacang hijau yakni mencapai 112.800,17 ton dari tahun 2012 hingga 2017. Tahun produksi terbesar terjadi pada tahun 2016 yakni dengan produksi hasil pangan sebesar 5.758.613,22 ton. Tahun produksi terendah terjadi pada tahun 2012 yakni hanya mencapai 4.007.234,06 ton.

Produksi total pada komoditas padi adalah sebesar 18.243.878.84 ton, produksi terbanyak terjadi pada tahun 2017 mencapai 3.274.627,00 ton dan terendahnya mencapai 2.596.409,01 ton pada tahun 2012, dengan rata-rata hasil produksi mencapai 3.040.646 ton. Produksi total pada komoditi jagung adalah sebesar 1.525.958 ton dengan hasil produksi terbesar dicapai pada tahun 2017 sebesar 1.525.958 ton, sedangkan pada tahun 2012 komoditi jagung mencapai produksi terendah sejumlah 140.490,80 ton, dengan rata-rata hasil produksi mencapai 1.176.830 ton dari tahun 2012 hingga 2017.

Tabel 20. Luas Panen Tanaman Pangan Kabupaten Bangkalan (Ha)

Komoditas	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Padi	46.155,00	46.544,00	52.284,00	50.104,00	52.322,00	52.774
Jagung	53.287,00	59.282,00	57.727,00	58.998,00	58.850,00	62.745
Kedelai	3.627,00	10.293,00	10.096,00	8.887,00	10.335,00	6.200
Kacang Tanah	30.942,00	28.957,00	26.443,00	27.325,00	29.290,00	18.907
Kacang Hijau	2.924,00	2.155,00	2.220,00	1.909,00	2.536,00	2.642
Ubi Kayu	3.587,00	2.752,00	3.054,00	2.438,00	2.537,00	2.251
Ubi Jalar	1.546,00	897,00	1.411,00	1.250,00	925,00	1.121
total lahan per tahun	142.068,00	150.880,00	153.235,00	150.911,00	156.795,00	146.640,00

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 2018

Komoditi kedelai mencapai produksi terbesarnya pada tahun 2016 yakni sebesar 140.518,52 ton, tahun 2012 merupakan produksi terendah hanya mencapai 51.210,84 ton. Total produksinya adalah 661.524,65 dengan rata-rata produksi pertahunnya adalah 110.254 ton sejak tahun 2012 hingga 2017. Komoditi kacang tanah mencapai produksi terbesarnya pada tahun 2016 yakni sebesar 360.674,35 ton, tahun 2017 merupakan produksi terendah hanya mencapai 234.069 ton dengan rata – rata produksi pertahunnya adalah 324.694 ton sejak tahun 2012 hingga 2017. Kemudian pada komoditi kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar masing masing produksi tertingginya pada tahun 2013 untuk kacang hijau, 2012 untuk ubi kayu, dan tahun 2015 untuk ubi jalar. Dengan jumlah produksi masing - masing 23.380,63 ton tertinggi dan 13.564,71 ton terendah untuk kacang hijau, 719.756,85 ton tertinggi dan 443.267 ton terendah untuk ubi kayu, serta 199.879,16 ton tertinggi dan 130.650,09 ton terendah untuk produksi ubi jalar.

Dengan rata-rata produksi masing-masing 18.800 ton, 549.272 ton, dan 158.814 ton dari tahun 2012 hingga 2017.

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa luas panen tanaman pangan kabupaten bangkalan tahun 2012 hingga 2017 mengalami fluktuasi yakni pada tahun 2012 luas panen tanaman pangan kabupaten bangkalan seluas 142.068,00 Ha. Lahan panen tanam tanaman pangan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2014, kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2015 yakni seluas 150.911,00 Ha. Pada tahun 2017 terjadi penyusutan luas area panen yakni sebanyak 10.155,00 Ha, dari awalnya pada tahun 2016 luas panen mencapai 156.795,00 Ha menjadi 146.640,00 Ha pada tahun 2017. Tahun 2016 adalah tahun dengan luas panen terluas dalam kurun waktu 2012 hingga 2017.

Tabel 21. Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Bangkalan (Kw/Ha)

Komoditas	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Padi	56,25	63,42	596,91	22,52	22,52	62,05
Jagung	26,41	21,51	23,69	225,24	24,19	24,32
Kedelai	14,12	10,74	13,42	15,60	13,60	13,72
Kacang Tanah	11,15	12,26	11,94	123,52	12,31	12,38
Kacang Hijau	6,86	10,58	7,04	7,04	7,22	7,04
Ubi Kayu	200,66	232,06	163,65	202,12	197,62	196,92
Ubi Jalar	86,84	145,65	123,25	159,90	159,90	152,97

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 2018

Berdasarkan pada tabel 21. diatas dapat diketahui bahwa produktivitas tanaman pangan kabupaten bangkalan tahun 2012 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Produktivitas terbesar terjadi pada tanaman padi pada tahun 2014 yakni sebesar 596,91 sedangkan produktivitas terkecil terjadi pada tanaman kacang hijau pada tahun 2012 sebesar 6,86%. Produktivitas pada tanaman padi tertinggi adalah pada tahun 2014 sebesar 596,91 kw/Ha dan terkecil pada tahun 2016 yakni sebesar 22,52 kw/ha. pada tanaman jagung produktivitas terbesarnya pada tahun 2015 sebesar 225,24 kw/ha dan pada tahun 2013 merupakan produktivitas terkecil yakni sebesar 21,51 kw/ha. Produktivitas pada tanaman kedelai tertinggi adalah pada tahun 2015 sebesar 15,60 kw/Ha dan terkecil pada tahun 2013 yakni sebesar 10,74 kw/ha. Produktivitas pada tanaman kacang tanah tertinggi adalah pada tahun 2015 sebesar 123,52 kw/Ha dan terkecil pada tahun 2012 yakni sebesar

11,15 kw/ha. Produktivitas pada tanaman kacang hijau tertinggi adalah pada tahun 2013 sebesar 10,58 kw/Ha dan terkecil pada tahun 2012 yakni sebesar 6,86 kw/ha. Produktivitas pada tanaman ubi kayu tertinggi adalah pada tahun 2013 sebesar 232,06 kw/Ha dan terkecil pada tahun 2014 yakni sebesar 163,65 kw/ha. dan produktivitas pada tanaman ubi jalar tertinggi adalah pada tahun 2015 sebesar 159,90 kw/Ha dan terkecil pada tahun 2012 yakni sebesar 86,84 kw/ha.

Selain komoditas tanaman pangan bangkalan juga memiliki komoditas lain yakni tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan. Jenis tanaman hortikultura yang ada di Kabupaten bangkalan diantaranya adalah mangga, durian, jeruk keprok, jeruk besar, pisang, nangka, salak, alpukat, belimbing, jambu biji, jambu air, nanas, pepaya, sawo, sirsak, sukun, melinjo, dan rambutan.

Tabel 22. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Hortikultura Kabupaten Bangkalan 2012-2016

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Tanaman Mangga					
	Produksi (Kg)	174.765,00	131.173,00	136.656,00	154.812,00	167.197
	Tanaman Menghasilkan (Phn)	428.267,00	416.121,00	569.922,00	624.764,00	669.278
	Produktivitas (Kg/Phn)	0,41	0,31	0,24	0,25	0,25
2	Tanaman Durian					
	Produksi (Kg)	12.341,00	12.137,00	13.785,00	16.197,00	16.951
	Tanaman Menghasilkan (Phn)	19.059,00	14.633,00	21.240,00	30.208,00	24.774
	Produktivitas (Kg/Phn)	0,65	0,82	0,65	0,65	68,42
3	Tanaman Jeruk Keprok					
	Produksi (Kg)	6.822,00	2.724,00	4.680,00	2.701,00	2.744
	Tanaman Menghasilkan (Phn)	12.271,00	10.894,00	16.425,00	14.290,00	15.763
	Produktivitas (Kg/Phn)	0,56	0,25	0,28	0,19	0,17
3	Tanaman Jeruk Besar					
	Produksi (Kg)	1.117,00	6.293,00	6.750,00	4.657,00	2.678
	Tanaman Menghasilkan (Phn)	3.036,00	7.339,00	8.497,00	5.083,00	3.954
	Produktivitas (Kg/Phn)	0,37	0,85	0,79	0,92	0,68
4	Tanaman Pisang					
	Produksi (Kg)	99.337,00	107.233,00	107.346,00	103.694,00	105.445
	Tanaman Menghasilkan (Phn)	701.169,00	810.676,00	632.320,00	707.452,00	719.860
	Produktivitas (Kg/Phn)	0,01	0,13	16,34	0,15	0,15
4	Tanaman Nangka					
	Produksi (Kg)	30.294,00	39.974,00	47.041,00	45.444,00	243
	Tanaman Menghasilkan (Phn)	54.323,00	74.953,00	78.960,00	65.396,00	504

	Produktivitas (Kg/Phn)	0,56	0,53	0,60	0,81	48,21
6	Tanaman Salak					
	Produksi (Kg)	21.035,00	25.242,00	34.001,00	30.308,00	17.544
	Tanaman Menghasilkan (Phn)	219.801,00	300.955,00	229.952,00	151.747,00	207.088
	Produktivitas (Kg/Phn)	0,10	0,83	0,15	0,20	8,47
6	Tanaman Alpukat					
	Produksi (Kg)	323,00	107,00	329,00	243,00	4,01
	Tanaman Menghasilkan (Phn)	729,00	288,00	841,00	504,00	877
	Produktivitas (Kg/Phn)	0,44	0,37	0,22	48,21	0,46
6	Tanaman Belimbing					
	Produksi (Kg)	294,00	294,00	484,00	287,00	243
	Tanaman Menghasilkan (Phn)	1.002,00	1.961,00	2.008,00	1.487,00	1939
	Produktivitas (Kg/Phn)	2,29	0,19	0,24	0,24	12,53
6	Tanaman Jambu Biji					
	Produksi (Kg)	18.466,00	18.112,00	19.005,00	12.726,00	13.997
	Tanaman Menghasilkan (Phn)	91.215,00	78.333,00	96.535,00	89.038,00	136.169
	Produktivitas (Kg/Phn)	0,20	0,23	0,20	0,14	0,10
6	Tanaman Jambu Air					
	Produksi (Kg)	2.658,00	3.268,00	2.095,00	1.067,00	2.101
	Tanaman Menghasilkan (Phn)	10.134,00	7.996,00	8.208,00	7.831,00	10.432
	Produktivitas (Kg/Phn)	0,26	0,41	0,26	0,14	0,20
6	Tanaman Nanas					
	Produksi (Kg)	1.801,00	3.787,00	2.178,00	2.562,00	667
	Tanaman Menghasilkan (Phn)	47.936,00	60.777,00	57.003,00	27.336,00	62.196
	Produktivitas (Kg/Phn)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02
6	Tanaman Pepaya					
	Produksi (Kg)	6.486,00	7.848,00	7.803,00	6.621,00	7.858
	Tanaman Menghasilkan (Phn)	32.904,00	41.678,00	40.438,00	44.886,00	47.332
	Produktivitas (Kg/Phn)	0,20	0,18	0,19	0,15	0,17
6	Tanaman Sawo					
	Produksi (Kg)	2.714,00	3.496,00	4.081,00	6.491,00	2.754
	Tanaman Menghasilkan (Phn)	9.431,00	9.270,00	10.946,00	19.472,00	10.698
	Produktivitas (Kg/Phn)	0,29	0,37	0,37	0,33	0,26
6	Tanaman Sirsak					
	Produksi (Kg)	793,00	887,00	1.127,00	532,00	581
	Tanaman Menghasilkan (Phn)	3.606,00	5.681,00	9.911,00	5.801,00	6.694
	Produktivitas (Kg/Phn)	0,22	0,15	0,11	0,09	0,09
6	Tanaman Sukun					
	Produksi (Kg)	1.826,00	899,00	1.344,00	762,00	742
	Tanaman Menghasilkan (Phn)	3.152,00	2.723,00	2.100,00	1.889,00	3.091
	Produktivitas (Kg/Phn)	0,58	0,33	0,64	0,40	0,24

6	Tanaman Melinjo					
	Produksi (Kg)	9.667,00	5.233,00	8.056,00	9.020,00	7.503
	Tanaman Menghasilkan (Phn)	52.256,00	45.557,00	35.715,00	51.864,00	51.128
	Produktivitas (Kg/Phn)	0,18	0,11	222,56	17,39	0,15
7	Tanaman Rambutan					
	Produksi (Kg)	121.159,00	67.721,00	44.871,00	55.414,00	47.929
	Tanaman Menghasilkan (Phn)	235.984,00	152.634,00	227.346,00	140.817,00	227.887
	Produktivitas (Kg/Phn)	0,51	0,44	0,20	0,39	21,03

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Data di atas merupakan data tanaman hortikultura Kabupaten Bangkalan tahun 2012 hingga tahun 2016. Produksi tertinggi terdapat pada tahun 2012 yakni sebesar 174.765 kg pada komoditas mangga. Produktivitas terendahnya sebesar 107 kg pada tahun 2013 pada komoditas Alpukat. Rata – rata produksi tanaman hortikultura kabupaten bangkalan adalah 28.366,14 kg. Pada tanaman hortikultura selama kurun waktu 2012 sampai 2016 tertinggi terdapat pada tahun 2013, mencapai 810.676 pohon pada komoditas pisang, tanaman menghasilkan terendahnya pada tahun 2013 dengan jumlah 288 pohon pada komoditas alpukat. rata-rata tanaman menghasilkan hortikultura kabupaten Bangkalan yakni sebesar 110.536 pohon.

Produktivitas tanaman hortikultura kabupaten bangkalan dalam kurun waktu 2012 hingga 2016, produktivitas tertinggi pada tahun 2014 produksi komoditas melinjo, dengan produktivitas mencapai 222,56 Kg/phn. Sedangkan, perolehan hasil produktivitas tanaman hortikultura terendahnya terdapat pada tahun 2012, hanya mencapai 0,01 Kg/phn pada tanaman pisang. Rata-rata perolehan produktivitas tanaman hortikultura Kabupaten Bangkalan mencapai 4,58 kg/phn. Data di atas merupakan data luas panen, produktivitas dan produksi tanaman Perkebunan Kabupaten Bangkalan tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Luas panen tertinggi terdapat pada tahun 2011 yakni sebesar 8.307,52 Ha pada komoditas kelapa. Luas panen terendahnya sebesar 2.558,12 Ha pada tahun 2016 pada komoditas kapuk randu. Rata – rata luas panen tanaman pangan kabupaten bangkalan adalah 5.927,21 ha.

Pada Produktivitas hasil pertanian tanaman pangan selama kurun waktu 2011 sampai 2016 tertinggi terdapat pada tahun 2014, mencapai 14.399,55 Kw/Ha pada komoditas kelapa, produktivitas terendahnya pada tahun 2015 dengan jumlah 272,50 Kw/Ha pada komoditas kapuk randu. Rata – rata produktivitas hasil tanaman perkebunan kabupaten Bangkalan yakni sebesar 1.347,33 Kw/Ha.

Tabel 23. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Bangkalan 201-2016

No.	Uraian	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kelapa						
	Produksi (Kg)	2.482,21	2.079,27	1.794,20	2.350,60	2.059,40	2.060,15
	Luas Panen Hektar (Ha)	8.307,52	8.206,15	8.076,38	8.025,00	7.868,21	7.868,21
	Produktivitas (Kg/Ha)	814,40	697,79	609,49	14.399,55	701,50	701,50
2	Kapuk Randu						
	Produksi (Kg)	1.977,59	659,85	646,49	646,49	526,79	526,79
	Luas Panen Hektar (Ha)	3.314,19	3.280,55	2.661,82	2.661,82	3.470,63	2.558,12
	Produktivitas (Kg/Ha)	860,22	301,37	380,09	380,09	272,50	701,50
3	Jambu Mente						
	Produksi (Kg)	1.198,43	1.074,17	1.054,70	713,46	713,47	589,85
	Luas Panen Hektar (Ha)	7.189,70	7.208,69	6.807,64	6.395,04	6.395,04	6.395,04
	Produktivitas (Kg/Ha)	557,06	488,18	413,33	313,61	335,72	312,50

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Produksi tanaman pekebunan kabupaten bangkalan pada periode tahun 2011 hingga 2016. Produksi tertinggi yakni pada tahun 2011 komoditas kelapa, dengan hasil produksi mencapai 2.482,21 ton pada komoditas kelapa. Sedangkan, perolehan hasil produksi tanaman perkebunan terendahnya terdapat pada tahun 2015, yang hanya mencapai 526,79 ton pada komoditas kapuk randu. Rata-rata perolehan produksi tanaman perkebunan Kabupaten Bangkalan mencapai 1.286,33 ton.

4.40. Peternakan

Karakteristik geografis Kabupaten Bangkalan yang sebagian besar berbukit, berbatu dan berupa lahan kering merupakan salah satu factor penentu bahwa peternakan hewan pedaging merupakan salah satu komoditi dominan didalam system usaha tani di kabupaten Bangkalan. Fakta empiris menunjukkan

bahwa lahan kering memiliki kuantitas yang sangat besar untuk digunakan sebagai factor produksi pertanian. Rumah tangga petani yang terlibat dalam usaha pertanian lahan kering relative jauh lebih banyak dan cenderung meningkat. Kadaan ini menjelaskan bahwa ketergantungan rumah tangga petani terhadap lahan kering sebagai sumber pendapatan dan lapangan usaha dipedesaan semakin tinggi.

Potensi ternak potong local sebagai penghasil daging belum dimanfaatkan secara optimal melalui perbaikan manajemen pemeliharaan. Ternak local memiliki beberapa kelebihan yaitu daya adaptasinya, tinggi terhadap lingkungan setempat, mampu memanfaatkan pakan berkualitas rendah dan mempunyai daya reproduksi yang baik (Suryana,2009). Demikian juga dengan hewan ternak di kabupaten Bangkalan, pakan ternak pada musim penghujan biasanya rumput gajah, rumput lapang, daun-daunan dan sebagainya. Pada musim kemarau pakan yang diberikan adalah seadanya meliputi lembah pertanian kering, daun kering dan sebagainya. Sistem pemeliharaan di tingkat peternak hanya mengandalkan sumber pakan seadanya yang tersedia didaerah setempat. Kualitas pakan yang kurang bagus dan jumlah yang kurang dapat mengganggu proses reproduksi pada ternak.

Tabel 24. Jumlah Hewan Ternak Mamalia (Populasi)

JUMLAH TERNAK					
TAHUN	SAPI PERAH	SAPI POTONG	KERBAU	KAMBING	DOMBA
2013	24	186.027	1.492	76.958	3.901
2014	20	191.245	1.400	70.99	3.002
2015	21	197.675	1.352	72.225	1.992
2016	20	200.279	1.290	73.003	2.232
2017	20	206.946	1.275	89.899	2.055
2018	20	107.28	593	44.937	829

Sumber: Dinas Perternakan Kabupaten Bangkalan 2018

Pada tahun 2017 merupakan tahun perolehan tertinggi sapi potong di Kabupaten Bangkalan mencapai 206.946 ekor. Sedangkan perolehan terendah sapi potong pada tahun 2013 mencapai 186.027 ekor dan setiap tahunnya jumlah sapi potong mengalami kenaikan jumlahnya. jumlah ternak Kabupaten Bangkalan dari kerbau selama kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2018 tertinggi terdapat

pada tahun 2013 mencapai 1.492 dan terendah pada tahun 2018 mencapai 593. Jumlah ternak kambing tertinggi pada tahun 2017 mencapai 89.899 sedangkan perolehan terendah pada tahun 2018 sebesar 44.937. Pada hewan ternak domba perolehan tertinggi pada tahun 2013 mencapai 3.901 dan jumlah terendah ada tahun 2018 mencapai 829.

Tabel 25. Jumlah Hewan Ternak Unggas (Populasi)

Jumlah Ternak					
TAHUN	AYAM KAMPUNG	AYAM PETELUR	AYAM PEDAGING	ITIK	ENTOK
2013	955.309	21.217	184.000	48.306	
2014	970.196	31.780	736.000	54.095	
2015	990.545	100.909	758.000	59.738	
2016	100.909	100.909	529.800	62.331	
2017	1.072.042	105.007	372.153	74.942	40.392
2018	553.669	48.355	192.514	35.385	

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan 2018

Berdasarkan data jumlah ternak padayam kampung tersebut menunjukkan bahwa perolehan tertinggi pada tahun 2017 mencapai 1.072.042 sedangkan jumlah terendah pada tahun 201 mencapai 553.669. Pada ayam petelur jumlah tertinggi pada tahun 2017 mencapai 105.007 sedangkan jumlah terendah pada tahun 201 mencapai 48.355. Pada ayam pedaging jumlah tertinggi pada tahun 2015 mencapai 758.000 dan jumlah terendah pada tahun 2013 mencapai 184.000. Pada itik jumlah terendah pada tahun 2018 35.358 sedangkan jumlah tertinggi pada tahun 2017 mencapai 74.942.

4.41. Perikanan

Tabel 26. Jumlah Petani Ikan Tangkap

TAHUN	JUMLAH PETANI PERIKANAN TANGKAP
2015	5 918
2016	5 926
2017	5 358

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah petani perikanan tangkap pada tahun 2015 sampai tahun 2017 yang terdapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan. Tahun 2016 merupakan jumlah tertinggi sebesar 5.926

sedangkan jumlah terendah pada tahun 2017 sebesar 5.358. Rata-rata selama kurun waktu tiga tahun tersebut adalah 5.734.

Tabel 27. Produksi Ikan Tangkap (Ton)

TAHUN	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
2013	25812,30
2014	28264,04
2015	28264,0
2016	28715,7
2017	53376

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2013 sampai tahun 2017 yang terdapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan. Tahun 2017 merupakan jumlah tertinggi sebesar 53.376 Ton sedangkan jumlah terendah pada tahun 2013 sebesar 25812,30 Ton. Rata-rata selama kurun waktu lima tahun tersebut adalah 32.886,41 Ton.

Tabel 28. Jumlah Rumah Tangga / Perusahaan Ikan Laut

TAHUN	JUMLAH RUMAH TANGGA ATAU PERUSAHAAN PERIKANAN LAUT
2013	5 887
2014	1 373
2015	2 986
2016	4 318

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga atau perusahaan perikanan laut pada tahun 2013 sampai tahun 2016 yang terdapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan. Tahun 2013 merupakan jumlah tertinggi sebesar 5, 887 sedangkan terendah pada tahun 201 sebesar 1,373. Rata-rata selama kurun waktu empat tahun tersebut adalah 3,641.

Tabel 29. Luas Area Pemeliharaan Ikan Darat (Ha)

TAHUN	AREAL PEMELIHARAAN IKAN DARAT
2013	1 300,66
2014	1 239,45
2015	1 693,13
2016	1 693,13
2017	1 693,13

Sumber : BPS Bangkalan & BPS Jawa Timur 2018

Tabel diatas menunjukkan jumlah areal pemeliharaan ikan darat pada tahun 2013 sampai tahun 2017 yang terdapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan. Tahun 2016 serta tahun 2015 merupakan jumlah tertinggi sebesar 1 693,13 sedangkan jumlah terendah pada tahun 2014 sebesar 1 239,45. Rata-rata selama kurun waktu lima tahun tersebut adalah 2374,2.

Tabel 30. Jumlah Perahu/Kapal

TAHUN	JUMLAH PERAHU/KAPAL
2013	2 695
2014	2 970
2015	2 994
2016	3 212

Sumber : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah perahu atau kapal pada tahun 2013 sampai tahun 2016 yang terdapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan. Tahun 2016 merupakan jumlah tertinggi sebesar 3 212 sedangkan jumlah terendah pada tahun 2013 sebesar 2 695. Rata-rata selama kurun waktu empat tahun tersebut adalah 2 967,75.

4.42. Pariwisata

Tabel 31. Jumlah Kunjungan Wisata

Wisatawan Mancanegara	2015	2016	2017
Jawa Timur	108.605	220.570	200.657
Bangkalan	126	98	281

Sumber : BPS Jawa Timur dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bangkalan

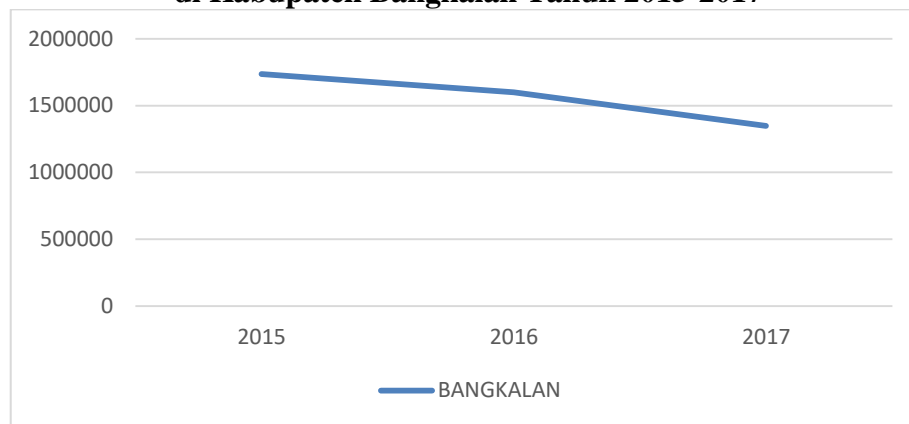
Daerah dengan kunjungan wisatawan mancanegara tertinggi adalah Kecamatan Arosbaya. Dengan destinasi wisata tertinggi yang dikunjungi oleh wisatawan manca negara adalah Pasarean Aer Mata Ebu. Secara kumulatif terdapat kenaikan jumlahwisatawan manca negara dari tahun 2015 ketahun 2016 sebesar51% meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 22%. Kondisi pergerakan wisatawan manca negara di Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Tabel 32. Perkembangan Jumlah Wisatawan Nusantara Ke Bangkalan

Wisatawan Nusantara	2015	2016	2017
Bangkalan	1.735.985	1.600.617	1.349.141
Jawa Timur	55.553.911	13.701.599	NA

Sumber : BPS Jawa Timur dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bangkalan

Daerah dengan kunjungan wisatawan manca negara tertinggi adalah Kecamatan Bangkalan dengan destinasi wisata tertinggi yang dikunjungi oleh wisatawan nusantara adalah Pasarean Syaikhona Kholil. Secara kumulatif terdapat penurunan jumlah wisatawan nusantara dari tahun 2015 ketahun 2017 sebesar 22%. Penurunan wisatawan tidak hanya terjadi di wilayah Kabupaten Bangkalan secara khusus namun juga terjadi di wilayah Jawa Timur secara umum. Pergerakan jumlah wisatawan nusantara di Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut.

Gambar 29. Perkembangan Jumlah Wisatawan Nusantara di Kabupaten Bangkalan Tahun 2015-2017

Sumber : BPS Jawa Timur dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bangkalan

Tabel 33. Jumlah Jenis Tempat Wisata di Kabupaten Bangkalan

Tahun	Wisata Alam	Wisata Budaya	Wisata Minat Khusus
2014	10	16	10
2015	7	10	9

Sumber : BPS Jawa Timur dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bangkalan

Obyek wisata yang lebih banyak diminati di Kabupaten Bangkalan dalam kurun waktu 2014-2015 adalah obyek wisata budaya. Adapun pada tahun 2016 dan seterusnya data yang digunakan adalah data per obyek pariwisata dan tidak lagi menggunakan data per kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan.

Tabel 34. Jumlah Kunjungan Wisatawan Per Kecamatan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2016-2017

Kecamatan	2016		2017	
	Domestik	Mancanegara	Domestik	Mancanegara
Kamal	0	0	0	0
Labang	0	0	0	0
Kwanyar	2155	0	3096	0
Modung	0	0	0	0
Blega	0	0	0	0
Konang	3465	0	2301	0
Galis	0	0	2186	0
Tanah Merah	0	0	0	0
Tragah	0	0	0	0
Socah	1750	0	4767	0
Bangkalan	919040	31	689374	0
Burneh	0	0	0	0
Arosbaya	668820	67	629658	0
Geger	3013	0	3236	0
Kokop	0	0	0	0
Tanjung Bumi	0	0	12478	0
Sepulu	2374	0	2045	0
Klampus	0	0	0	0
Jumlah	1600617	98	1349141	0

Sumber : BPS Bangkalan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bangkalan

Kunjungan wisatawan terbanyak adalah di Kecamatan Bangkalan yang diikuti oleh Kecamatan Arosbaya. Sebagian kecamatan mengalami kenaikan kunjungan wisatawan dari tahun 2016 ke 2017 sedangkan beberapa kecamatan lainnya mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Kabupaten Bangkalan secara agregat mengalami penurunan jumlah kunjungan wisata. Pada tahun 2017 Obyek Pariwisata yang paling sering dikunjungi adalah Pasarean Aer Mata Ebu yang berada di Kecamatan Arosbaya. Pada tahun 2018 triwulan pertama obyek pariwisata yang paling sering dikunjungi juga masih sama dengan tahun 2017. Beberapa obyek pariwisata mengalami penurunan kunjungan wisata pada tahun 2018 sejauh triwulan pertama.